

**BOOK CHAPTER** berjudul “Ilmu Ekonomi: Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro” ini merupakan hasil kolaborasi akademisi bidang ekonomi lintas perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini hadir dari dengan konsep monodisiplin dengan tema-tema terstruktur yang telah ditentukan. Meskipun demikian, setiap penulis berhak membangun pemahaman konseptual dari perspektif masing-masing.

Substansi buku ini berisi tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Ia juga hadir menjelaskan tentang bagaimana ekonomi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Selain itu, ia juga membahas tentang teori-teori ekonomi utama seperti teori makro ekonomi dan mikro ekonomi, serta menjelaskan tentang bagaimana pemerintah dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi.

Buku ini dikemas dalam 12 bab, di antaranya: Pengertian dan fungsi ekonomi; Peran pemerintah dalam bidang ekonomi; Perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi Pasar; Konsep biaya produksi; Struktur pasar; Teori produksi; Pendapatan nasional; Uang dan lembaga keuangan; Bank central, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Nilai tukar, Pengangguran dan inflasi, Perdagangan luar negeri.

Penjelasan para penulis dalam buku ini dapat menjadi saran untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana berbagai faktor ekonomi saling terkait; mengetahui teori-teori ekonomi; penjelasan tentang teori-teori ekonomi utama, seperti teori makroekonomi dan mikroekonomi, yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi; meningkatkan kemampuan analisis. Selain itu, buku ini juga dapat mejadi sarana memberikan pemahaman tentang cara menganalisis data ekonomi dan mengambil keputusan yang tepat; juga dapat membantu seseorang memahami peran pemerintah dan perusahaan dalam ekonomi.

Ditinjau dari muatannya, buku ini sangat laik untuk dimiliki dan dibaca oleh para praktisi dan akademisi ekonomi baik mikro maupun makro dan juga mahasiswa ekonomi. Buku ini dapat membantu mahasiswa memperluas wawasan tentang teori-teori ekonomi dan memahami bagaimana ekonomi bekerja dalam konteks yang berbeda; juga memperkuat pemahaman konsep yang diajarkan dalam kelas.

Selamat membaca!



publicabooks.ascasrya.or.id  
publicainstitute@gmail.com  
publicainstitute\_jakarta  
Penerbit Publica Institute Jakarta

BUKU EKONOMI

ISBN 978-623-5257-80-8



9 786235 257808



Ilmu Ekonomi

Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro

Editor:  
Fachrurazi

pi

BOOK CHAPTER

# Ilmu Ekonomi

Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro

Novi Febriyanti, Muhammad Yazid, Abdul Aziz,  
Muhamad Saechu, Wanti Ernawati, Monica Olivia,  
Soleh Hasan Wahid, Anjar Kususiyanah, Misno, Reni Helvira,  
Ema Elisa, Rianda Hanis, Ana Fitriyatul Bilgies

# **ILMU EKONOMI**

## **Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro**

Publica Indonesia Utama

2023

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **ILMU EKONOMI**

## **Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro**

Editor: Fachrurazi

Novi Febriyanti, Muhammad Yazid, Abdul Aziz,  
Muhamad Saechu, Wanti Ernawati, Monica Olivia,  
Soleh Hasan Wahid, Anjar Kususiyannah, Misno, Reni Helvira,  
Ema Elisa, Rianda Hanis, Ana Fitriyatul Bilgies

Publica Indonesia Utama

2023

---

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

vi + 233 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-623-5257-80-8**

Cetakan Pertama, Februari 2023

Judul:

Ilmu Ekonomi: Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro

Penulis

Novi Febriyanti, Muhammad Yazid, Abdul Aziz, Muhamad Saechu, Wanti Ernawati, Monica Olivia, Soleh Hasan Wahid, Anjar Kususiyannah, Misno, Reni Helvira, Ema Elisa, Rianda Hanis, Ana Fitriyatul Bilgies

Editor : Fachrurazi

Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute

Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2023

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

# KATA PENGANTAR

Buku berjudul “Ilmu Ekonomi: Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro” ini merupakan hasil kolaborasi akademisi bidang ekonomi lintas kampus di Indonesia. Buku ini hadir dengan konsep monodisiplin dengan tema-tema terstruktur yang telah ditentukan, namun dibangun atas ragam perspektif penulis dari realitas di lapangan. Penerbit mengapresiasi luar biasa kepada penulis yang telah berusaha menuangkan ide dan gagasan buku ini.

Substansi buku ini berisi tentang dasar-dasar ilmu ekonomi dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga hadir menjelaskan tentang bagaimana ekonomi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Selain itu, ia juga membahas tentang teori-teori ekonomi utama seperti teori makroekonomi dan mikroekonomi, serta menjelaskan tentang bagaimana pemerintah dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi. Lebih lanjut, buku ini ditujukan untuk pembaca yang ingin memahami dasar-dasar ilmu ekonomi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Substansi tersebut dirangkum dalam 12 bagian, di antaranya: Pengertian dan Fungsi Ekonomi, Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Perilaku Konsumen, Produsen dan Efisiensi Pasar, Konsep Biaya Produksi, Struktur Pasar, Teori Produksi: Evolusi Pemikiran Ekonomi dan Praktiknya di Era Kontemporer, Komprehensi Pendapatan Nasional: Teori, Aplikasi dan Implikasi Hukum, Uang dan Lembaga Keuangan, Bank Sentral, Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Nilai Tukar, Pengangguran dan Inflasi, Perdagangan Luar Negeri.

Buku ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal: Memahami cara kerja ekonomi: Buku ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana berbagai faktor ekonomi saling terkait; Mengetahui teori-teori ekonomi: Buku ini akan memberikan penjelasan tentang teori-teori ekonomi utama, seperti teori makroekonomi dan mikroekonomi, yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi;

Meningkatkan kemampuan analisis: Buku ini akan memberikan pemahaman tentang cara menganalisis data ekonomi dan mengambil keputusan yang tepat; Mempersiapkan diri untuk dunia kerja: Buku ilmu ekonomi dapat membantu seseorang mempersiapkan diri untuk bekerja di bidang ekonomi atau yang berhubungan dengan ekonomi; Memahami peran pemerintah dan perusahaan dalam ekonomi: Buku ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah dan perusahaan mempengaruhi ekonomi dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat.

Bagi mahasiswa ekonomi, buku ini dapat membantu mahasiswa memperluas wawasan tentang teori-teori ekonomi dan memahami bagaimana ekonomi bekerja dalam konteks yang berbeda; Memperkuat pemahaman konsep: Buku ilmu ekonomi dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam memperkuat pemahaman konsep yang diajarkan dalam kelas; Memperdalam pengetahuan: Buku ilmu ekonomi dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang topik-topik tertentu dalam ekonomi yang belum dipahami secara baik; Membantu dalam persiapan ujian dan tugas: Buku ilmu ekonomi dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam persiapan ujian dan tugas, sehingga membantu mahasiswa dalam mengejar nilai yang baik; Mempersiapkan diri untuk dunia kerja: Buku ilmu ekonomi dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk menjadi profesional ekonomi yang siap untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

Editor

# DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	iii
Halaman Balik Sampul .....	iv
Kata Pengantar Editor .....	
Daftar Isi .....	v
1. Pengertian dan Fungsi Ekonomi <i>Novi Febriyanti</i> .....	1
2. Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi <i>Muhammad Yazid</i> .....	23
3. Perilaku Konsumen, Produsen dan Efisiensi Pasar <i>M. Saechu dan Abdul Aziz</i> .....	37
4. Konsep Biaya Produksi <i>Wanti Ernawati</i> .....	56
5. Struktur Pasar <i>Monica Olivia</i> .....	75
6. Teori Produksi: Evolusi Pemikiran Ekonomi dan Praktiknya di Era Kontemporer <i>Soleh Hasan Wahid</i> .....	96
7. Komprehensi Pendapatan Nasional: Teori, Aplikasi dan Implikasi Hukum <i>Anjar Kususiyanah</i> .....	123
8. Uang dan Lembaga Keuangan <i>Misno</i> .....	139
9. Bank Sentral, Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal <i>Reni Helvira.</i> .....	166

10. Nilai Tukar	
<i>Ema Elisa</i> .....	181
11. Pengangguran dan Inflasi	
<i>Rianda Hanis</i> .....	206
12. Perdagangan Luar Negeri	
<i>Ana Fitriyatul Bilgies</i> .....	220
EPILOG.....	

# PENGERTIAN DAN FUNGSI EKONOMI

Novi Febriyanti

Universitas Alma Ata Yogyakarta

novi febriyanti @almaata.ac.id

**Abstrak:** Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang di dalamnya mempelajari mengenai aktivitas maupun perilaku manusia (sosial) berupa kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi baik barang maupun jasa. Ekonomi berasal dari kata "*oikos*" yang artinya keluarga atau rumah tangga. Sedangkan kata "*Nomos*" yang artinya hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, ekonomi dapat didefinisikan sebagai peraturan yang berlaku di dalam sebuah rumah tangga. Dalam ilmunya, ekonomi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai segala usaha manusia dalam mewujudkan kemakmuran hidupnya. Dalam mewujudkan kemakmuran hidupnya, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dari kegiatan tersebut dapat memicu masalah dalam hal ekonomi, misalnya antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan keberadaan barang yang semakin terbatas.

## Pendahuluan

Terjadinya permasalahan ekonomi global yang belum usai, Indonesia telah membuktikan bahwa aspek perekonomiannya tetap dalam kondisi dengan prospek yang baik. Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Bank Indonesia telah memprediksi pada tahun 2023 berada dalam kisaran 4,5-5,3% dan pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 4,7-5,5% yang didukung dengan adanya investasi, konsumsi wisata serta kinerja ekspor yang stabil. Hal ini mengarah ke arah positif di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi secara global. Terjadinya Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dapat diperkirakan pada tahun 2023 akan menurun dengan sasaran  $3,0 \pm 1\%$  dan pada tahun 2024 sebesar  $2,5 \pm 1\%$ . Adanya inflasi inti diperkirakan akan kembali pada semester pertama tahun 2023. Hal ini disebabkan karena inflasi harga masih impor yang

terkendali (inflasi impor) bersamaan dengan nilai rupiah yang stabil dan respon kebijakan moneter yang *forward looking, pre-emptive, dan front-loaded*.

Perlunya koordinasi kebijakan antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) serta Pemerintah Pusat untuk memberikan kontribusi aktif dalam mengendalikan inflasi. Inovasi dan sinergi yang aktif akan menjadi prospek kinerja perekonomian Indonesia ke arah positif pada tahun 2023 dan 2024 yang memperkuat kebangkitan dan ketahanan ekonomi. Hal ini telah disampaikan oleh Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Tahunan Bank Indonesia (RTBI) tahun 2022 yang digelar *hybrid* di Jakarta.

Joko Widodo selaku Presiden RI, berpesan "*Tahun 2023 memang kita harus hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme*". Joko Widodo menegaskan bahwa ke depannya kondisi global diperkirakan masih belum ada kepastian dan akan sulit untuk diprediksi. Dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter, perlu ditegaskan agar kebijakan perekonomian nasional dapat menyalurkan manfaat yang maksimal bagi rakyat dan negara dalam memperkuat dan menghidupkan ekonomi nasional (Febriyanti, 2020).

Demi mempertahankan perekonomian Indonesia yang sejalan dengan pesan Presiden RI, Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa adanya inovasi dan sinergi aktif menjadi kunci utama dalam menghadapi ekonomi global. Membangun sikap optimisme menjadikan pemulihan ekonomi semakin diperkuat dengan tetap waspada pada penyebaran sentimen global, khususnya resiko reflasi (inflasi dan resesi tingkat tinggi) dan resiko stagflasi (inflasi tinggi dengan perlambatan ekonomi). Hal tersebut terjadi karena resiko koreksi dari tumbuhnya ekonomi global di berbagai negara jika terjadi fragmentasi pada aspek ekonomi dan politik yang terus berlanjut serta ketatnya kebijakan moneter akan memperlambat penekanan inflasi di setiap negara.

Pertumbuhan sistem kredit pada tahun 2023 dan 2024 menuju pada kisaran 10-12%. Keuangan dan perekonomian berbasis digital juga terus meningkat dengan total transaksi yang terjadi di *e-commerce* diperkirakan mencapai 572 triliun dan 689 triliun, sedangkan jumlah

uang elektronik sebesar 508 triliun dan 640 triliun serta bank digital mencapai lebih dari 67 ribu dan 87 ribu triliun. Namun dengan adanya serba digitalisasi keuangan, ketahanan sistem tetap terjaga dari sisi resiko kredit, permodalan, dan resiko likuiditas. Stabilitasnya eksternal tetap terjaga dengan transaksi berjalan yang diprediksi berada pada surplus 0,4% hingga defisit 0,4% PDB tahun 2023 dan pada tahun 2024 diprediksi surplus 0,2% hingga defisit 0,6% PDB. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan transaksi surplus keuangan dan modal ditopang oleh investasi portofolio dan FDI (Bank Indonesia, 2022).

Adanya kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2023 akan terus mengarahkan bagian dari pembauran kebijakan nasional demi pemulihan, penguatan ketahanan serta bangkitnya perekonomian di Indonesia di tengah kondisi global yang akan memperlambat resiko resesi di berbagai negara. Bank Indonesia menegakkan kebijakan moneter pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas (*pro-stability*). Sedangkan melalui 4 kebijakan Bank Indonesia, antara lain kebijakan dalam sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial, kebijakan ekonomi keuangan serta kebijakan dalam pasar keuangan inklusif yang terus diarahkan dalam upaya mempercepat pulihnya perekonomian nasional (*pro-growth*).

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi berasal dari kata "*oikos*" yang artinya rumah tangga atau keluarga. Sedangkan "*nomos*" yang artinya aturan yang berlaku. Jadi, secara harfiah ekonomi dapat diartikan sebagai berbagai aturan atau tata cara dalam rumah tangga. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji perilaku pasar keuangan mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham hingga fluktuasi ekonomi (Alispahic, 2021). Dalam pembahasannya, ekonomi berisi mengenai pemahaman seseorang dalam lingkup bagaimana ekonomi berperilaku dalam kegiatan bermasyarakat, memberikan pemahaman dalam mengambil sebuah keputusan,

memberikan pemahaman mengenai keterbatasan dan potensi dalam kebijakan ekonomi yang diambil bahkan dapat mempengaruhi kepekaan manusia terhadap berbagai problematika ekonomi global (Parera, 2021).

Berbicara tentang masalah ekonomi tidak lepas dari masalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Masalah ini dihadapi oleh semua manusia, semua masyarakat dan semua negara. Dari beberapa literatur yang ada, banyak definisi ekonom yang menghasilkan lebih dari ekonomi. Para ahli ini mengemukakan definisi ekonomi yang tampak berbeda padahal sebenarnya sama (Curea, 2013). Perbedaannya karena mereka melihat ekonomi dari berbagai perspektif dan latar belakang ilmu pengetahuan, politik, sosial, budaya dan agama. Beberapa ahli tersebut antara lain (Kuncoro, 2019):

1. Alfred Marshall

Melalui bukunya yang berjudul *"The Principle of Economics"*, Alfred Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan individu manusia serta perbudakan dan hubungannya dengan menggunakan barang atau material.

2. H. J. Davenport

Melalui bukunya yang berjudul *"Economics of Enterprise"*, Davenport berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang dapat mengendalikan berbagai permasalahan melalui titik tolak harga. Adanya ilmu mengenai ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempelajari bagaimana tingkatan kegiatan produksi secara maksimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. M. Manullang

Berdasarkan pendapat Manullang, ekonomi merupakan ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara manusia dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginan supaya dapat mencapai kemakmuran hidup dan memenuhi kebutuhannya baik berupa jasa ataupun barang.

4. Oscar Langen

Berdasarkan pendapat Oscar Langen, ekonomi adalah ilmu yang membahas mengenai pengelolaan berbagai sumber daya baik

itu alam maupun manusia dengan skala kecil ataupun besar. Pengelolaan sumber daya ini kemudian akan dianalisis secara maksimal agar dapat mengoptimalkan kebutuhan manusia.

5. John Stuart Mill

Berdasarkan pendapat John Stuart Mill, ekonomi merupakan ilmu yang membahas mengenai asal muasal adanya penagihan dan pengeluaran. Bukan hanya itu saja, dalam ilmu ekonomi juga mempelajari mengenai kegiatan produksi serta pendistribusian kekayaan.

6. Prof. P. A. Samuelson

Berdasarkan pendapat Prof. P. A. Samuel, dalam bukunya yang berjudul *"Economics: An Introductory Analysis"*, beliau memaparkan bahwa ilmu ekonomi membahas mengenai bagaimana manusia dalam menentukan pilihannya ketika terbatasnya sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya yang terbatas ini akan membuat manusia untuk memilih barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

7. Louis Cantori

Berdasarkan pendapat Louis Cantori, ekonomi dalam perspektif islam merupakan segala hal mengenai kegiatan muamalah yang berpedoman pada nilai-nilai islami. Contohnya perihal jaminan perputaran harta kekayaan yang dimiliki seseorang dengan zakat.

8. Suherman Rosyidi

Berdasarkan pendapat Suherman Rosyidi (filosof Indonesia), ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta tercapainya kemakmuran hidup.

9. Adam Smith

Berdasarkan pendapat Adam Smith sebagai seorang tokoh teori ekonomi klasik, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dalam memilah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

## 10. Mankiw

Berdasarkan pendapat Mankiw, beliau mempercayai bahwa manusia yang berkuasa terhadap perekonomian dapat meningkatkan pemahamannya mengenai berbagai keterbatasan dan potensi dalam kebijakan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi juga membahas mengenai perilaku individu yang berinteraksi satu sama lain.

## B. Cabang-Cabang Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai segala aktivitas manusia dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Demi mendapatkan tujuannya (mencapai kemakmuran), manusia akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa (Yuniarti, 2019). Akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat memicu masalah ekonomi seperti tidak seimbangnya antara terbatasnya sumber daya yang dihasilkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas (Saparuddin, 2022). Beberapa pembagian jenis ilmu ekonomi antara lain :

### 1. Ilmu Ekonomi Terapan

Dalam ilmu ekonomi terapan membahas mengenai penerapan prinsip dan teori-teori ekonomi dalam suatu keadaan dengan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi sehingga berfokus pada praktis ekonomi, termasuk bagi seseorang dalam pengambilan keputusan, pedoman, kebijakan ataupun standar dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Penerapan ekonomi biasanya menggunakan studi empiris maupun statistika. Contoh penerapannya yaitu dalam lingkungan perusahaan, perbankan, dan ekonomi moneter. Bagian dari ilmu ekonomi yang digunakan dalam mengetahui fungsi, sifat serta pengaruh uang dalam aktivitas perekonomian disebut ekonomi moneter.

### 2. Ilmu Ekonomi Deskriptif

Dalam ilmu ekonomi deskriptif menguraikan mengenai gambaran kegiatan ekonomi di tengah masyarakat yang

terjadi. Ilmu ekonomi ini akan memaparkan fenomena yang terjadi menjadi sebuah deskripsi serta kondisi lingkungan ekonominya. Berbagai macam sumber data yang diperoleh lalu dikumpulkan dalam bentuk grafik, angka, kurva maupun bentuk lainnya. Misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) yang tugasnya memberikan gambaran mengenai kondisi maupun fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia baik secara makro maupun mikro. Diterapkannya ilmu ekonomi deskriptif juga pernah digunakan dalam menangani masalah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia.

### 3. Ilmu Ekonomi Makro

Dalam ilmu makroekonomi membahas mengenai beragam kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan perekonomian, yaitu menitikberatkan tujuan dalam memenuhi target ekonomi yang telah ditetapkan. Target tersebut adalah mempertahankan neraca perdagangan internasional dan kestabilan harga. Selain itu ekonomi makro juga berperan dalam pemenuhan kesempatan lapangan pekerjaan sehingga terjadi pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini diulas dalam materi ilmu ekonomi makro karena banyaknya peperangan hingga kasus inflasi sebagai penyebab naiknya harga secara terus menerus yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara.

### 4. Ilmu Ekonomi Mikro

Dalam ilmu mikroekonomi membahas mengenai kegiatan ekonomi dalam lingkup mikro (kecil). Tidak seperti makroekonomi yang membahas mengenai ekonomi suatu wilayah, ilmu mikroekonomi cenderung terbatas yang hanya meliputi harga tertinggi dan harga dasar yang perlu ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan nilai antara penawaran dan permintaan. Apabila terjadi kasus monopoli di dalam pasar, maka akan memperkecil peluang bagi pengusaha baru yang dapat menyebabkan jumlah wirausaha menurun. Dalam ilmu mikroekonomi juga menyinggung aspek yang ada dalam individu seperti aktivitas konsumen, distributor, dan produsen.

5. Ilmu Ekonomi Publik

Dalam ilmu ekonomi publik membahas mengenai fungsi dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di suatu negara. Hal-hal yang meliputi ekonomi publik yaitu biaya retribusi, penerapan pajak, anggaran dana pemerintah sampai hutang suatu negara. Dalam ekonomi ini mayoritas yang berperan adalah pengamat ekonomi ataupun pejabat pemerintahan karena terlibat secara langsung.

6. Ilmu Ekonomi Moneter

Dalam penerapan ilmu ekonomi moneter membahas mengenai penerapan peraturan dan kebijakan moneter dalam sebuah negara. Ilmu ini nantinya akan memaparkan tentang berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur stabilitas perputaran keuangan dalam sebuah negara. Selain itu juga membahas mengenai perbankan dan keuangan dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Aspek yang dipelajari antara lain jumlah uang yang beredar, terjadinya inflasi, dan suku bunga yang ada di perbankan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi moneter membahas tentang bagaimana uang dapat bekerja melalui perputaran.

7. Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan ilmu ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM) membahas mengenai faktor produksi bagi karyawan yang berawal dari kualitas karyawan, perolehan kesempatan kerja serta gaji yang didapatkan. Lingkup dari penerapan SDM ini meliputi struktur tenaga kerja, dinamika penduduk, ketenagakerjaan, sektor formal-informal, mobilitas, transisi penduduk, pekerja anak, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pembangunan kependudukan dan ekonomi serta perencanaan tenaga kerja.

8. Ilmu Ekonomi Internasional

Dalam penerapan ilmu ekonomi internasional membahas mengenai aktivitas yang berasal dari ekonomi secara global. Kegiatan ekonomi internasional tidak hanya terjadi dalam satu negara saja, tetapi melibatkan negara lain. Contoh dari ekonomi

internasional yaitu keterlibatan World Trade Organization (WTO); Dana Moneter Internasional (IMF); dan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Keterlibatan dari berbagai pihak sangat berperan penting dalam operasional bisnis internasional. Selain itu, teori dalam ilmu ekonomi internasional bergerak secara dinamis dengan semakin maju dan berkembang. Hal-hal yang dipelajari dalam ekonomi internasional berkisar dari perdagangan antar negara, neraca pembayaran internasional dan neraca perdagangan internasional. Ilmu ekonomi yang kemudian akan ikut meninjau berbagai peristiwa politik internasional. Aktivitas ekonomi, dan masalah ekonomi saat ini, apakah itu perkembangan terbaru mengenai usulan Brexit Inggris dari Uni Eropa atau perubahan tarif Amerika Serikat baru-baru ini. Disiplin ini juga mengintegrasikan berbagai prinsip dan pendekatan makroekonomi dan mikroekonomi.

#### 9. Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi daerah adalah ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi ekonomi antar daerah dan perkembangannya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian di daerah tersebut. Perekonomian daerah sendiri juga dapat dijadikan sebagai media dalam membantu pemerintah daerah untuk menganalisis problematika ekonomi yang kerap terjadi. Lalu pemerintah akan membuat kebijakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

#### 10. Ilmu Ekonomi Industri

Dalam penerapan ilmu ekonomi industri membahas mengenai analisis yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Dalam lingkup ekonomi industri juga berhubungan dengan interaksi antar perusahaan, selain itu juga mengetahui tentang studi perusahaan, industri serta pangsa pasar yang dimulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar (multinasional). Interaksi yang terjadi biasanya dalam hal persaingan dalam bisnis dan kinerja dari perusahaan. Topik yang berkaitan dengan ekonomi industri antara lain aktivitas persaingan pasar, struktur pasar, dan oligopoli.

### 11. Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam

Dalam penerapan ilmu ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) membahas mengenai permasalahan antara alokasi SDA dengan mengupayakan semaksimal mungkin sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang dapat dilihat dari aspek ekonomi berupa eksternalitas negatif dan positif.

### 12. Ilmu Ekonomi Syariah

Dalam penerapan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi islam. Pokok pembahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba, zakat, dan lain-lain.

## C. Prinsip Ekonomi

Prinsip Ekonomi tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun dengan meminimalisir kerugian yang dapat berakibat fatal. Prinsip ekonomi memiliki tujuan untuk mencegah aktivitas konsumen secara berlebihan, dan hanya mengupayakan apapun yang dimiliki (Aziz, 2018). Berikut prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diterapkan, antara lain (Effendi, 2019):

#### 1. Pengorbanan Biaya Diperlukan untuk Mendapatkan Sesuatu

*Opportunity Cost* atau biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang harus dilakukan bagi sebuah perusahaan atau seseorang demi mendapatkan apa yang diinginkan. Selain itu biaya juga dapat diartikan sebagai pengorbanan dalam mendapatkan komoditas bagi perusahaan. Dalam konteks pengorbanan dapat berupa barang, tenaga, waktu, kesempatan ataupun uang yang dikeluarkan. Apabila pengorbanan dilakukan tanpa memiliki tujuan disebut dengan perilaku boros. Biaya relevan merupakan tujuan pengambilan biaya pada alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi kepada alternatif tindakan lainnya.

Dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap biaya relevan. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dengan baik aspek biaya relevan yang akan dikeluarkan. Sedangkan biaya tidak

relevan ialah biaya yang sama dengan alternatif tindakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan biaya tidak relevan tidak diperbolehkan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

## 2. Pemikiran Rasional

Berpikir rasional merupakan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran yang logis dan dapat dinalar. Sehubungan dengan hal tersebut, *Oxford Dictionary* memaparkan mengenai pemikiran rasional yang berarti kesesuaian antara nalar maupun logika seseorang dalam berpikir secara jernih dan masuk akal. Menurut para ahli, pengungkapan pemikiran rasional merupakan kemampuan dalam menarik sebuah kesimpulan yang logis sehingga dapat diterima oleh orang lain. Dari pemaparan di atas, rasional berarti kemampuan seseorang dalam berpikir menggunakan logika dan nalarnya sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain, dapat dipercaya kebenarannya serta dibenarkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Prinsip ekonomi dengan pemikiran rasional akan membawa keuntungan marjinal yang dihasilkan.

## 3. Pasar sebagai Tempat Terjadinya Kegiatan Ekonomi

Pasar merupakan salah satu dari banyaknya lembaga, sistem, hubungan sosial, prosedur serta infrastruktur dalam menjalankan bisnis meliputi kegiatan menjual barang maupun jasa bersama dengan orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk ke lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak memiliki batas geografis. Dalam hal ini, pasar mengacu pada semua aktivitas penawaran dan permintaan tenaga kerja, modal, sekuritas, dan uang. Fungsi pasar antara lain sebagai sarana distribusi atau memperlancar proses pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Penetapan nilai pasar akan menetapkan harga barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen akhir sebagai sarana promosi. artinya pasar juga dijadikan

sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan produknya kepada calon konsumen (pembeli).

4. Pemerintah Berwenang Menambah Faktor Produksi

Terjadinya intervensi dalam aspek perekonomian kerap terjadi karena campur tangan pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar membantu para pedagang pasar supaya dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, kini para penjual dapat dengan mudah memaksimalkan pendapatannya dengan menambah pendapatan barang atau memperdagangkan saham sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh prinsip peningkatan faktor produksi adalah meningkatnya jumlah perusahaan bangkrut yang mengakibatkan kegagalan pasar. Dalam hal ini pemerintah kemudian dapat berkontribusi untuk menyelamatkan semua perusahaan tersebut dari kebangkrutan, dan menjaga kelancaran setiap produksi. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memadamkannya, atau dengan kata lain, pengambilalihan suatu perusahaan oleh pemerintah.

5. Trade-Off dan Biaya Peluang

Dalam mengambil sebuah keputusan pada aspek ekonomi pasti akan dihadapkan dengan satu pilihan yang harus memilih di antara pilihan tersebut dengan mengorbankan pilihan lain. Terjadinya *trade off* pasti akan dialami oleh seseorang dengan pemerataan dan efisiensi yang berarti unsur masyarakat mengharapkan pendapatan hasil yang maksimal dai pemanfaatan sumber daya yang ada dan pemerataan pendistribusian hasil sumber daya yang tersedia.

6. Standar Hidup Suatu Negara Tergantung pada Kemampuannya Dalam Memproduksi Jasa dan Barang

Standar hidup dalam sebuah negara akan sebanding lurus terhadap kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan jasa maupun barangnya. Jika kemampuan mereka dapat menghasilkan barang dan jasa cukup tinggi, maka taraf hidup mereka juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Adanya

peningkatan produktivitas serta pertumbuhan dapat digunakan dalam menentukan naik turunnya pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara. Misalnya kemajuan dibidang teknologi seperti negara Jepang yang tidak hanya maju dibidang itu saja, tetapi unggul dalam aspek industri juga. Negara ini memiliki keunggulan dalam memproduksi barang yang sangat berkualitas tinggi dalam jumlah besar-besaran. Hal ini tentunya didukung melalui teknologi yang ada di sana sehingga menjadi standar dalam kegiatan ekonominya yang dapat mempengaruhi efektivitas masyarakat sebagai karyawannya.

#### 7. Manfaat Perdagangan Semua Pihak

Kegiatan perdagangan sendiri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional yang memberikan dukungan dalam peningkatan produksi , penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan devisa , pemerataan pendapatan, dan penguatan daya saing produk dalam negeri untuk kepentingan nasional.

Kegiatan dagang merupakan suatu susunan aktivitas manusia yang berkaitan dengan adanya perdagangan jasa ataupun barang yang diperjual-belikan di dalam maupun diluar suatu negara yang bertujuan untuk pengalihan hak milik atas perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dari kedua belah pihak biasanya akan memperoleh ganti rugi ataupun imbalan atas kegiatan tersebut. Adanya aktivitas ini menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara sehingga memberikan dampak meningkatnya kegiatan memproduksi suatu barang, sebagai peluang dalam membuka lapangan kerja, peningkatan devisa negara bagi eksportir, pendapatan yang merata serta memperkuat persaingan produk dalam negeri.

#### 8. Harga akan naik jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar

Meningkatnya peredaran jumlah uang di suatu negara dapat mengakibatkan tinggi produksi terhadap mata uang. Hal ini dapat memicu nilai mata uang yang semakin tidak berharga sehingga dapat menyebabkan tingginya harga barang dipasaran

padahal nilai mata uang menurun. Misalnya terjadinya hiperinflasi di Zimbabwe yang sampai memproduksi uang kertas dengan nominal 10 miliar.

#### 9. Masyarakat Menghadapi Pertukaran Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran

Hubungan antara inflasi dengan *trade-off* serta banyaknya pengangguran dalam suatu negara dapat terjadi selama beberapa kurun waktu. Meningkatnya inflasi dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di negara tertentu saja. Tetapi kasus tersebut tidak berlaku bagi Indonesia karena adanya inflasi dapat ditandai dengan suatu kondisi ekonomi yang mengalami peningkatan harga secara cepat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat yang turun, menurunnya tingkat investasi ataupun tabungan karena tingkat konsumsi masyarakat juga mengalami peningkatan. Berdasarkan ilmu ekonomi modern, terdapat 2 jenis inflasi, yakni inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

Pada dasarnya peningkatan harga dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni hiperinflasi atau terjadinya inflasi yang tidak dapat dikendalikan (peningkatan harga di atas 100% dalam 1 tahun), inflasi berat (peningkatan harga antara 30% sampai 100% dalam 1 tahun). Inflasi sedang (peningkatan antara 10% sampai 30% dalam 1 tahun) serta inflasi ringan (peningkatan di bawah 10% dalam 1 tahun).

#### 10. Setiap Orang Lebih Responsif Terhadap Insentif

Pada dasarnya seseorang akan merasa lebih aktif ketika akan memperoleh tambahan terhadap apa yang dia lakukan. Berdasarkan hal tersebut terdapat 10 prinsip kegiatan ekonomi ketika seseorang akan merasa bersemangat ketika mendapatkan imbalan terhadap apa yang dilakukannya.

### D. Fungsi Si'stem Ekonomi

Bagi suatu negara, sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan roda perekonomian. Beberapa fungsi sistem ekonomi adalah (Tarigan, 2020),

1. Bagi pemberi semangat dalam berproduksi.
2. Untuk mengkoordinasikan kegiatan individu dalam perekonomian.
3. Mengatur pembagian hasil suatu produksi kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
4. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik.

Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dll) agar perekonomian dapat dihindari. Hal ini dapat dikategorikan melalui berbagai sistem ekonomi sebagai berikut (Sukirno, 2020),

#### 1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional ialah aktivitas atau kegiatan ekonomi yang paling umum dilakukan. Ketika terjadi permasalahan, dapat diselesaikan berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang telah diwariskan turun temurun oleh pelaku ekonomi tradisional sebelumnya. Sistem ekonomi ini melakukan kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada unsur jual beli. Adanya sumber daya yang bisa dimanfaatkan serta tenaga kerja seseorang yang bisa diandalkan tanpa adanya campur tangan teknologi. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah,

- a. Tidak adanya peran produksi dan konsumsi dalam rumah tangga.
- b. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat menerapkan prinsip barter.
- c. Dalam menghasilkan suatu barang tidak ada campur tangan dari teknologi.
- d. Dalam penerapan proses produksi hanya mengandalkan hasil kebun, bercocok tanam maupun berburu.

Meskipun sederhana dalam penerapan ekonomi ini mempunyai keunggulan, antara lain tidak terdapat eksploitasi tenaga manusia

maupun sumber daya alam karena masyarakat hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tanpa mencari keuntungan. Terbatasnya jumlah produksi, melambatnya pertumbuhan ekonomi serta tidak layaknya barang ketika melakukan barter.

## 2. Sistem Ekonomi Liberal (Pasar)

Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Perbedaannya dengan sistem tradisional terletak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang mana sistem ekonomi pasar cenderung akan berusaha mendapatkan profit sebanyak-banyaknya.

Peranan negara dalam hal ini hanya mengawasi kegiatan tersebut bahkan cenderung tidak berperan dalam hal apapun. Keberadaan sistem ekonomi ini sejalan dengan teori yang disampaikan Adam Smith yang berisi, "*Laissez Faire , Laissez Passer*", yang berarti dalam aktivitas ekonomi negara harus memberikan kewenangan sebebaskan pada masyarakat. Banyak negara-negara yang telah menganut sistem perekonomian ini, antara lain Inggris, Amerika, negara-negara Eropa, seperti Jerman. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah,

- a. Peran rakyat dibagi atas 2 kelompok, yakni rakyat sebagai penerima pekerjaan yang diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaannya dan rakyat sebagai pemberi lapangan pekerjaan yang bebas menentukan jenis usahanya.
- b. Kebebasan masyarakat dalam membeli peralatan produksi untuk menunjang kegiatan usahanya dengan menggunakan uang sendiri.
- c. Pemicu terjadinya persaingan secara bebas.
- d. Minimnya peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini.
- e. Selalu mempertimbangkan kondisi pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam penerapan sistem ekonomi pasar, pemerintah benar-benar memberikan kebebasan secara penuh terhadap masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Peran pemerintah yang sangat minim ini dapat memicu

terjadinya persaingan bebas secara tidak sehat karena masing-masing pengusaha akan memegang kendali penuh dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu juga dapat mendorong seorang pengusaha untuk terus berinovasi agar dapat terus bersaing dengan pengusaha lainnya. Tetapi pada kenyataannya sistem ekonomi ini juga berdampak negatif bagi berbagai pihak, khususnya pengusaha kecil. Pengusaha dengan modal kecil dapat dengan mudah terkalahkan dengan pengusaha yang bermodal tinggi. Kekalahannya dari segi kuantitas, kualitas, produktivitas bahkan akan kesulitan dalam membuat promo untuk menghindari kerugian. Selain itu juga dapat memicu resiko resesi atau krisis ekonomi di negara tersebut.

### 3. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando biasa disebut dengan sistem ekonomi terpusat atau terpimpin atau sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi liberal dimana negara memegang penuh kendali atas penguasaan sumber daya baik alam maupun modal dalam menggerakkan roda ekonomi dalam sebuah negara. Negaralah yang dapat menentukan barang apa saja yang akan diproduksi, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana penetapan harga jual barang, serta pekerjaan yang harus dilakukan. Tujuan dari sistem ekonomi komando yaitu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Korea Utara merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi ini. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah,

- a. Segala bentuk kekayaan dikuasai dan dikendalikan oleh negara sehingga masyarakat tidak diizinkan untuk mengambil tanpa izin negara.
- b. Segala aktivitas perekonomian diatur oleh negara.
- c. Masyarakat hanya berperan dalam pelaksanaannya.

Negara yang menerapkan sistem ekonomi ini memang terkesan tegas dan otoriter, tetapi dalam penerapannya negara itu jarang mengalami krisis ekonomi. Hal ini disebabkan karena negara akan terus mengupayakan untuk mempertahankan perekonomiannya agar terus stabil. Selain itu dari segi pendapatan rakyatnya juga merata karena negaralah yang mengatur mengenai pembagian kerja bagi

rakyatnya. Rakyat sebagai pelaksananya tidak diberikan kesempatan dalam berinovasi karena negara yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi. Selain itu dari sistem ekonomi ini akan membuat kualitas barang menjadi tidak maksimal baik itu tidak diakuinya hak pribadi dan pemaksaan terhadap kebijakan.

#### 4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi gabungan antara sistem ekonomi komando dan liberal yang berarti negara bersama rakyat mempunyai peranan penting dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah negara Mesir, Perancis, dan Brazil. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah,

- a. Rakyat ataupun swasta bersama negara saling bahu membahu membangun kegiatan ekonomi dan memecahkan masalah bersama-sama.
- b. Negara memiliki kewenangan dalam menguasai aset sumber daya vital dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan rakyatnya meliputi air, hutan, dll.
- c. Rakyat akan diberikan kebebasan dalam menentukan keinginannya dalam memproduksi barang atau jasa, menerapkan harga, dan pendistribusiannya tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah.
- d. Apabila barang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga maka pemerintah akan ikut campur dalam menetapkan batas harga yang beredar.

Kebebasan yang diberikan negara kepada rakyat dalam melakukan aktivitas ekonominya didukung dengan peran peraturan pemerintah akan mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Selain itu dapat mendorong rakyatnya untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan ide kreatifnya dalam meningkatkan produk. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi akan meminimalisir terjadinya monopoli bisnis yang terjadi. Diterapkannya sistem ekonomi campuran harus dimaksimalkan dengan cara memberikan kesempatan baik bagi rakyat maupun pemerintah untuk saling mengingatkan agar selalu berada dalam kondisi yang stabil dan terkendali.

## 5. Sistem Perekonomian di Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia berpedoman pada ekonomi Pancasila sebagai pengembangan dari ideologi negara sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila serta ekonomi campuran. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi pancasila adalah,

- a. Segala aktivitas perekonomian negara berdasarkan asas kekeluargaan.
- b. Negara sebagai penguasa atas segala sumber daya yang ada dan mengelolanya untuk kemakmuran masyarakat. Contohnya, air dan listrik yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara.
- c. Segala aktivitas perekonomian harus berlandaskan pelestarian lingkungan sehingga terhindar dari bentuk penyimpangan eksploitasi terhadap sumber daya.

Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu setiap lapisan masyarakat bebas untuk berinovasi terhadap ada yang diinginkan, tetapi masih dalam batas wajar dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi perlunya memprioritaskan kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Di samping memiliki kelebihan, sistem ekonomi ini juga mempunyai kelemahan, yaitu dalam mengambil keputusan yang lambat disebabkan harus mementingkan kepentingan bersama.

## 6. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas konsep agama islami. Dalam sistem ini, sektor keuangan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi tidak menjadi perhatian utama, karena perekonomian hanya dilakukan dalam kegiatan riil. Penjaminan jumlah uang beredar merupakan salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa hal yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi lain dilarang dalam sistem ekonomi Islam, seperti penimbunan uang, suku bunga, dan perjudian. Berikut kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi islam, antara lain:

- a. Terdapat pendistribusian kekayaan dalam islam.

- b. Terdapat hak hidup dan jaminan sosial bagi seseorang dalam suatu negara.
- c. Rendahnya minat literasi mengenai ekonomi Islam
- d. Pendidikan masyarakat yang masih mengutamakan materialisme.

Dalam sistem ekonomi Islam, uang harus beredar dan digantikan oleh barang atau jasa. Pelaku usaha juga harus bekerja dan berusaha berdagang. Dari sistem perekonomian islam berpedoman pada konsep rezeki bagi setiap negara yang menganutnya untuk terus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini harus memberikan kemudahan serta penyedia sumber daya ekonomi agar perekonomian tetap tumbuh secara stabil dan terus menerus.

### **Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai macam sistem ekonomi diterapkan sesuai dengan kondisi suatu negara. Umumnya perbedaan dasar di antara setiap sistem ekonomi yaitu kaitannya dengan pengaturan faktor-faktor produksinya. Terdapat sistem ekonomi yang mengizinkan pelaku usahanya untuk mempunyai segala hal yang berhubungan dengan produksinya, tetapi ada pula pelaku usaha yang terbatas dalam hal yang berhubungan dengan produksinya. Selain itu juga dari segi pengelolaan sumber daya yang diberikan kebebasan dalam mengelolanya dan terbatas untuk mendapatkannya. Secara umum sistem kegiatan ekonomi di dunia mengandalkan peran pemerintah dan rakyatnya sesuai dengan haknya. Selain itu perbedaannya juga terletak pada cara mengelola produksi dan cara mengalokasikan produk barang maupun jasa tersebut. Misalnya penerapan sistem ekonomi terencana yang faktor produksi dan hasil dari penjualan produk akan diserahkan langsung kepada negara selaku pemegang kendali atas kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam penerapan ekonomi liberal, faktor produksi dan alokasi barang maupun jasa sepenuhnya dipegang oleh pasar melalui konsep permintaan dan penawaran.

## **Bibliografi**

- Alispahic, Sabina, and Bakir Alispahic, "A New Decade for Social Changes," *Technium Social Sciences Journal* 17 (2021): 235-243.
- Aziz, Muhammad, dan Muhammad Ahsan. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar : CV. NurLina, 2018.
- Bank Indonesia. 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2432222.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432222.aspx).
- Curea, tefania Cristina, dan Costin Ciora, "The Impact of Human Capital on Economic Growth," *Quality - Access to Success* 14, No. SUPPL, 1 (2013): 395-399, [http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00258-0](http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00258-0)
- Effendi, Nury, dan Maman Setiawan. *Ekonometrika teoretis dan pendekatan terapan*. Jakarta : Salemba Empat, 2019.
- Febriyanti, N. (2020). Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Menurunkan Tingkat Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah. *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN SYARIAH* , 5 (2), 124-154. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445>
- Gramedia. 2022. *Pengertian Ilmu Ekonomi*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi/>
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Daerah (Teori dan Praktek)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- M. Saparuddin, Selly Yolanda, dan Karuniana Dianta Sebayang, "Pengaruh Investasi dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Trikonomika* 14, No, 1 (2015): 87.
- Parepa, Agoes. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Sukurno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2020.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung, Perpustakaan Setia, 2019.

### Biografi penulis



**Novi Febriyanti** Novi Febriyanti, ME lahir di Lamongan pada tanggal 16 Februari 1997. Memperoleh gelar Sarjana (S1) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Pendidikan Magister (S2) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Dan saat ini sedang melaksanakan Pendidikan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah juga. Bidang keilmuannya adalah ekonomi Islam, perbankan syariah, keuangan sosial dan manajemen bisnis. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Ia juga sering mengisi berbagai acara/kegiatan sebagai fasilitator seperti pembicara, trainer dan konsultan. Karyanya telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email : [novifebriyanti@almaata.ac.id](mailto:novifebriyanti@almaata.ac.id).

# PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

Muhammad Yazid

UIN Sunan Ampel Surabaya

muhammadyazid02@gmail.com

**Abstrak:** Bersumber pada praktek yang ada, secara universal intervensi pemerintah bisa digolongkan jadi 2 kelompok, ialah 1) kadangkala lumayan selaku regulator serta pengawas dan 2) kadangkala wajib berfungsi selaku penyedia serta pengelola. Secara spesial, penyedia serta pengelola dipecah jadi 2 guna, ialah 1) penyedia jasa serta benda publik dan 2) penyedia kebutuhan warga yang tidak bisa dipadati oleh pasar.

## Pendahuluan

Ilmu ekonomi lahir karena terdapatnya keadaan kelangkaan, ialah sesuatu keadaan dimana kebutuhan manusia tidak terbatas namun sumber energi yang dipunyai buat memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Konsep ekonomi tumbuh pada awal mulanya merupakan gimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Perihal ini pasti saja berimplikasi pada intervensi pemerintah yang terbatas. Pada tahun 1776, Adam Smith, seseorang ekonom klasik, menerbitkan suatu buku bertajuk *The Wealth of Nations*, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan merupakan pasar kebebasan. Smith melaporkan kalau mengaplikasikan pasar leluasa hendak mendesak alokasi sumber daya secara efisien serta efektif. Permintaan serta penawaran pasar ialah “tangan tidak kelihatan” (*invisible hand*) yang hendak memicu pasar guna menggapai keseimbangannya. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah, sebab hendak mengusik mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini pula kerap dituturkan *laissez-faire* (biarlah). Konsep ini tumbuh pesat serta puncaknya merupakan timbulnya revolusi industri (Kementerian Keuangan, 2022).

Namun, mekanisme pasar tidak selalu efektif dan efisien. Mengapa? Pertama, karena informasi yang dibutuhkan konsumen

dan pemasok tidak selalu tersedia, yang terkadang menyebabkan kelebihan atau kekurangan pasokan di pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap oleh pemasok, begitu pula sebaliknya. Kedua, persaingan juga tidak selalu efektif, persaingan yang tidak sehat seperti monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Ketiga, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Keempat, akan muncul kebutuhan masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pasar, seperti fasilitas umum. Contoh kegagalan pasar ini adalah Great Depression pada tahun 1930 (Hasna, 2020).

Pada tahun 1930-an, John Maynard Keynes, pelopor ekonomi makro, menerbitkan suatu buku bertajuk *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Lewat buku ini, Keynes menghasilkan gagasan tentang perlunya intervensi kebijakan pemerintah. Inspirasi ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Great Depression yang membuat laju respon jadi luar biasa besar. Keynes menerangkan kalau teknik terbaik buat menghasilkan sesuatu negara dari resesi (keadaan permintaan serta penawaran di dasar kapasitas maksimal) merupakan dengan mengaitkan pemerintah paling utama mendesak kembali posisi permintaan serta penawaran di pasar lewat kebijakan pengeluaran serta investasi (Wakatabe, 2017). Tidak hanya itu, untuk mengatur akibat sosial serta kawasan, pemerintah pula wajib mulai menekan bahan-bahan yang beresiko untuk sosial serta kawasan dengan kebijakan perpajakan. Pemerintah juga wajib berfungsi dalam sediakan barang publik yang tidak diminati oleh pihak swasta, sehingga pastinya memerlukan sumber pemasukan.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal sebagai kebijakan fiskal (Rusdiyantoro, 2022). Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes ini merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam perekonomian juga berkembang yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya *“The Government’s Role in Economy (2017), “In the narrowest sense, the government’s role in the economy is to help correct market failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could create for*

*society. This includes providing public goods, internalizing externalities, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of government in a capitalist economy.*" Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian sebenarnya terbagi menjadi tiga hal, yaitu 1) mengatasi kegagalan pasar akibat tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan pasar, termasuk penyediaan barang publik, 2) mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan karena industri, dan 3) mendorong persaingan pasar/persaingan yang sehat (Sukirno, 2019).

## **Pembahasan**

### **A. Definisi Pemerintah**

Dewasa ini banyak perkembangan dan kemajuan karena teknologi yang semakin maju dan banyak penemuan baru serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyaknya perdagangan yang saling terkait dan bertabrakan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur tatanan sistem ekonomi, karena tidak semua sektor ekonomi dapat ditangani oleh swasta (Febriyanti, 2018). Menurut Kozier Barbara, kedudukan merupakan serangkaian sikap yang diharapkan oleh orang lain terhadap seorang cocok dengan perannya dalam sesuatu sistem. Kedudukan dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam ataupun dari luar serta bertabiat normal. Kedudukan merupakan sesuatu wujud sikap yang diharapkan dari seorang dalam suasana sosial tertentu. Kedudukan merupakan deskripsi sosial tentang siapa kita serta siapa kita. Kedudukan jadi bermakna kala berhubungan dengan orang lain, komunitas sosial ataupun politik (Arsyad, 2016).

Sedangkan secara etimologis kata government berasal dari kata "command" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" yang menjadi kata "government" yang berarti badan atau organ elityang menjalankan tugas mengatur suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintahan dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi pemerintahan. Istilah governance dalam organ juga dapat dibedakan antara governance dalam arti luas dan governance

dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintahan dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh cabang eksekutif (Mundandar, 2021).

Menurut Siagian, pemerintah pada dasarnya berfungsi mengatur dan melayani. Fungsi regulasi biasanya dikaitkan dengan sifat negara modern sebagai negara hukum (*state of law*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan sifat negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Di sini jelas bahwa peranan pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus masyarakat dalam suatu negara dengan tujuan menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya (Anderson, 1976).

## **B. Peran Pemerintah**

Peran yang dimaksud adalah sebagai inovator, modernizer, pelopor dan pelaksana kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut: *Inovator*, dalam menjalankan peran sebagai inovator, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber hal baru. Maka prasyarat yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan perannya secara efektif, pemerintah perlu memiliki tingkat legitimasi yang tinggi. Pemerintah yang tingkat legitimasinya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menghadirkan inovasinya kepada rakyat. Tiga hal yang mutlak mendapat perhatian serius adalah penerapan inovasi di lingkungan birokrasi pertama, inovasi konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

*Modernisator*, lewat pembangunan, tiap negara mau jadi negara yang kokoh, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara- negara lain. Guna mewujudkan perihal tersebut, dibutuhkan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian serta keahlian manajerial, keahlian mencerna kekayaan alam yang dipunyai sehingga mempunyai nilai tambah yang besar, sistem pembelajaran nasional yang andal yang menciptakan sumber energi manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh serta demokratis, mempunyai visi yang

jelas tentang masa depan yang di idamkan sehingga berorientasi pada masa depan. Pelopor, sebagai pelopor pemerintah wajib jadi panutan (role model) untuk segala masyarakat.

Pelopor itu berbentuk hal- hal positif semacam kepeloporan bekerja seproduktif bisa jadi, kepeloporan menegakkan keadilan serta ketertiban, kepeloporan menjaga area, budaya serta masyarakat, serta kepeloporan berkorban demi negara. Para pelaksana sendiri, walaupun sesungguhnya penerapan bermacam aktivitas pembangunan ialah tanggung jawab nasional serta tidak sekedar jadi beban pemerintah, sebab bermacam pertimbangan semacam keamanan negara, modal yang terbatas, keahlian yang tidak memadai, sebab tidak diperlukan oleh masyarakat. dan karena secara konstitusional ialah tugas pemerintah, hingga sangat bisa jadi terjalin bermacam aktivitas yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan wajib dicoba oleh pemerintah sendiri (Mankiw, 2018).

Dalam dunia ekonomi makro modern, campur tangan pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak ada teori khusus yang digunakan untuk memutuskan sejauh mana intervensi pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah juga dapat dilihat dalam tiga bentuk berikut (Budiono, 2021):

1. Pada awalnya peran pemerintah adalah menjaga keamanan dan kenyamanan dalam pembangunan. Bahkan seringkali fungsi pemungutan pajak tidak dikhususkan untuk kepentingan rakyat. Ini adalah posisi pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian Negara Pelayanan, dimana peran pemerintah adalah sebagai pelayan sosial dari kebutuhan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didukung oleh banyaknya gagasan tentang Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Namun kemudian ada pula cara dalam menjalankan jabatan pemerintah yang memberikan peran pemerintah sebagai pengusaha atau penggerak prakarsa reformasi dan pembangunan masyarakat.

Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten/

kota) dan pemerintahan desa berdasarkan adanya desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah menjadi “agent of development” atau penggerak pembaharuan/pembangunan. Klasifikasi lain bagaimana menjalankan peran pemerintah juga dapat dikemukakan bahwa keterlibatan atau campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan kegiatan masyarakat (jika lebih positif adalah proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima cara berbeda, (Balapradhana, 2020):

1. Direct operation (operasional: pada dasarnya pemerintah melakukan kegiatan tertentu sendiri.
2. Kontrol langsung: penggunaan izin, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lainnya), peruntukan dan lain-lain. Hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang bersifat “action lader” (yang mengurus berbagai perizinan, alokasi, tarif dan sebagainya) atau sebaliknya mencoba bersifat action lader.
3. Pengendalian tidak langsung: dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan sepanjang untuk “daftar barang tertentu”.
4. Pengaruh langsung: persuasi dan saran digunakan di sini: misalnya, agar sekelompok orang tertentu dapat bergabung dengan koperasi tertentu, atau menjadi bagian dari program akseptor KB.
5. Pengaruh tidak langsung: ini adalah bentuk keterlibatan yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi,

menjelaskan arti pemerintahan, contoh efisiensi dan tidak pemborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal baru (meningkatkan sikap reseptif terhadap inovasi).

Peran pemerintah sebagaimana dikemukakan Sondang P secara umum tampak dalam berbagai bentuk, seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis keahlian, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, dan fungsi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. . Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar untuk memperhatikan masalah agama dan kepercayaan serta mengendalikan ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Sondang, 1981).

Kedudukan pemerintah merupakan gerak aktualisasi negara dalam menggapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma serta nilai bawah dalam interaksi dengan lingkungan. Komentar para pakar di atas bisa dipaparkan kalau kedudukan pemerintah merupakan ikatan antara pemerintah dengan yang diperintah dalam rangka menggapai tujuan yang di idamkan, perihal ini sejalan dengan peran pemerintahan lainnya yaitu proses pemenuhan kebutuhan rakyat. yang diatur untuk pelayanan publik yang tidak diprivatisasi dan pelayanan sipil untuk semua orang pada umumnya. jika perlu, buatlah hubungan transaksional sebagai berikut (Rondinelli, 1990):

1. Pemerintah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, setiap pilihan mengandung janji.
2. Setiap anggota masyarakat bebas memilih produk sesuai dengan aspirasinya. Kebebasan mereka dilindungi dan dijamin melalui layanan sipil.
3. Jika konsumen sudah menentukan pilihan antara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji itu ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial atas produk yang mereka terima.
5. Jika janji ditepati berarti produsen (pemerintah) yang bertanggung jawab, sebaliknya produsen yang harus bertanggung jawab.

6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam artian konsumen (masyarakat) membangun kepercayaan atas janji produsen (pemerintah).

Tugas pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan merupakan memusatkan kemandirian serta pembangunan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan, tidak dan merta dibebani oleh masyarakat. Butuh terdapatnya kedudukan pemerintah yang maksimal serta mendalam untuk membangun masyarakat, hingga kedudukan pemerintah yang diartikan antara lain (Nugroho, 2018):

1. Pemerintah selaku Regulator Kedudukan pemerintah selaku Regulator merupakan mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan penerapan pembangunan lewat penerbitan regulasi selaku regulator. Pemerintah membagikan acuan bawah kepada warga selaku instrumen guna mengendalikan segala aktivitas penerapan pemberdayaan.
2. Pemerintah selaku Dinamika Kedudukan pemerintah selaku penggerak merupakan menggerakkan partisipasi masyarakat pada saat terjalin hambatan dalam proses pembangunan guna mendesak serta melindungi dinamika pembangunan wilayah. Pemerintah berfungsi dengan membagikan pembinaan serta pengarahan yang intensif serta efisien kepada masyarakat. Umumnya pemberian bimbingan bisa diwujudkan lewat regu penyuluh ataupun tubuh tertentu untuk membagikan pelatihan.
3. Pemerintah sebagai Fasilitator Kedudukan pemerintah sebagai fasilitator merupakan menghasilkan keadaan yang kondusif untuk penerapan pembangunan guna menjembatani bermacam berbagai kepentingan masyarakat dalam optimalisasi pembangunan wilayah. Selaku fasilitator, pemerintah membagikan dorongan lewat pelatihan, pembelajaran serta kenaikan keahlian, dan pendanaan ataupun permodalan lewat pemberian dorongan permodalan kepada masyarakat yang berdaya.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan pembangunan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia yang menjalankan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah

diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur perekonomian. Adam Smith, pencetus sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena menganggap bahwa dalam ekonomi kapitalis, setiap individu paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktiknya menghadapi konflik kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menciptakan harmonisasi kepentingan masing-masing individu (Skousen, 1990). Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mengatur, membenahi atau mengarahkan kegiatan swasta. Dalam ilmu ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: 1) alokasi peran 2) distribusi peran, dan 3) stabilisasi peran (Muwaroh, 2019).

#### 1. Peranan Alokasi

Tidak seluruh barang serta jasa yang terdapat bisa disediakan oleh sektor swasta. Barang serta jasa yang tidak bisa disediakan oleh sistem pasar diucap barang publik, ialah barang yang tidak bisa disediakan lewat transaksi antara penjual serta pembeli. Terdapatnya barang yang tidak bisa disediakan lewat sistem pasar diakibatkan oleh kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak bisa sediakan barang/ jasa tertentu karena khasiat dari mempunyai barang tersebut tidak cuma dialami secara individu namun pula hendak dinikmati oleh orang lain. Contoh barang/ jasa yang tidak bisa disediakan lewat sistem pasar merupakan jalur raya, penjernihan hawa, serta sebagainya.

Lain halnya dengan beberapa barang individu, seperti sepatu, serta sebagainya. Barang privat bisa disediakan lewat sistem pasar karena mempunyai watak menguntungkan. Misalnya, seandainya Surya membeli sepatu, ia dapat mengecualikan Brata buat menikmati (mengenakan) barang tersebut. Untuk barang yang dialami oleh seluruh orang, begitu ada, tidak terdapat yang ingin membayar bayaran penyediaannya, karena seluruh orang ketahui kalau seluruh yang mereka bayarkan cumalah sebagian kecil dari total bayaran. Jadi akhirnya, kedudukan pemerintah dalam bidang alokasi merupakan membenarkan pengalokasian sumber energi ekonomi dicoba secara efektif.

## 2. Peranan Distribusi

Distribusi pemasukan bergantung pada kepemilikan aspek penciptaan, permintaan serta penawaran aspek penciptaan, sistem pewarisan serta keahlian buat mendapatkan pemasukan. Distribusi pemasukan serta kekayaan yang dihasilkan oleh sistem pasar bisa ditatap tidak adil oleh masyarakat. Permasalahan pemerataan dalam distribusi pemasukan ialah permasalahan yang lingkungan dalam ilmu ekonomi. Tetapi perkara keadilan ini tidak seluruhnya dalam ruang lingkup ilmu ekonomi karena perkara keadilan bergantung pada pemikiran masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Pemerintah bisa mengganti distribusi pemasukan secara langsung dengan pajak progresif, ialah beban pajak yang relatif lebih besar untuk kalangan kaya serta relatif lebih ringan untuk kalangan miskin, diiringi subsidi untuk kalangan miskin.

Pemerintah juga bisa secara tidak langsung pengaruhi distribusi pemasukan dengan kemampuan pengeluaran pemerintah, misalnya: perumahan murah untuk kelompok pemasukan tertentu, subsidi pupuk untuk petani serta sebagainya. Anggaran publik ataupun anggaran pemerintah memegang peranan bernilai dalam pembangunan sesuatu negara. Kami mengenali salah satu kedudukan ini dengan nama guna alokasi. Guna alokasi menyiratkan jika anggaran negeri wajib ditunjukkan untuk kurangi respon serta pemborosan sumber energi, dan tingkatkan efisiensi serta daya guna perekonomian. Sehingga pada hakekatnya guna alokasi berfungsi dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan universal.

## 3. Peranan Stabilisasi

Perekonomian yang diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta akan sangat sensitif terhadap guncangan yang akan memicu reaksi alergi dan inflasi. Tanpa campur tangan pemerintah, penurunan permintaan mobil akan menyebabkan pembuat mobil memangkas staf. Pegawai yang menganggur akan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti sepatu, TV, baju ganti sepatu, TV, dan pengusaha pakaian akan mengurangi pegawai. Sehingga gangguan pada satu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya, yang tanpa campur tangan pemerintah akan menyebabkan ledakan tenaga kerja yang akan mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi atau deflasi juga

merupakan sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani oleh pemerintah melalui keahlian moneter.

Definisi di atas dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan salah satu alat kebijakan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah mengacu pada kewenangan administratif di suatu wilayah yang lebih kecil dari negara dimana negara Indonesia adalah negara yang wilayahnya dibagi menjadi provinsi. Provinsi ini dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Kebijakan yang telah dibuat merupakan wujud dari sikap tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, salah satunya mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi. Pendekatan ekonomi politik perlu dilakukan untuk memfasilitasi proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat Keynes dalam hal kebijakan dimana intervensi pemerintah sangat relevan dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus memahami bagaimana memposisikan dirinya sebagai tokoh utama atau otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan (politik) tetapi juga memperhatikan masalah dan kebutuhan ekonomi rakyatnya. Selanjutnya, pemerintah perlu memikirkan cara untuk membangun hubungan dengan pihak swasta agar proses kebijakan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dari pihak manapun.

## **Simpulan**

Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung pada kondisi pasar. Jika pasar efektif, intervensi pemerintah cenderung rendah. Secara umum, pemerintah hanya akan memposisikan diri sebagai regulator dan pengawas, sedangkan penyerahan diserahkan kepada pasar (swasta). Namun jika pasar belum efektif (misalnya masih ada gap antara demand dan supply masyarakat), maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai pelaku pasar, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang

sudah mapan, seperti BUMN. Efektif atau tidaknya suatu pasar akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, sehingga tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, J. Public Policy Making. New York: NJ: Holt Reinhartnwinston. 1976.
- Arsyad, L. Ekonomi Pembangunan Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Balapradhana, A. B. (2020). Universal Basic Income (UBI): Solusi Resesi Ekonomi Di Tengah Pandemi. In K. & C. R. Z. Amelia (Ed.), Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemi (II). Syiah Kuala University Press.
- Febriyanti, Novi (2018) Implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hasna Azizah Syadza, Wahyuningtyas Alya Gusnawati, Lintang Ardiningrum. (2021), " Tinjauan Atas Langkah Pemerintah Dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Terkait APBN", Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara, Vol. 1, No. 2. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/1317>
- Kementerian Keuangan, 2022. Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>
- Mark Skousen, Sang Maestro. "Teori-Teori Ekonomi Modern" : Sejarah Pemikiran Ekonomi. Jakarta : Kencana, 1990.
- Mankiw, G. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Jakarta: Informatika. 2018.
- Meilinda, T.P., Mundandar, A.I., "KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19". Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 14, Nomor 1, Januari 2021 (1-9).

- Muwaroh, Nunung. 2019. "PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Good Governance DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS". *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No. 2, 143-159
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022), "Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, Vol. 4, No. 1. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706>
- Siagian, S.P, *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1981.
- Sukirno, S. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2019.
- Wakatabe, M. (2017), "The Great Depression and Macroeconomics Reconsidered: The Impact of Policy and Real-World Events on Economic Doctrines", Including a Symposium on New Directions in Sraffa Scholarship (Research in the History of Economic Thought and Methodology, Vol. 35B), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 237-302.

### Biografi penulis



#### **Muhamamd Yazid**

Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si. lahir di Gresik pada tanggal 17 November 1973. Ia lulus S1 di Program Studi Muamalah/ Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian lulus Magister Science Universitas Padjajaran Bandung dan lulus Doktorat Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini Ia adalah Dosen di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan mengampu mata kuliah di program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Tak hanya itu Ia juga menjadi Dewan Pengasuh dan Wakil Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan aly PPP Wali Songo Cukir Jombang, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Munawaroh Glanggang Duduk Gresik, Ketua Pengawas BMT Kesan Cabang Surabaya, Sekretaris KSPPS Kesan Pusat Langitan Widang Tuban, Manajer BMT AMDA Duduk Gresik, Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kota Surabaya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya, dan Pembimbing Haji&Umrh Shafira Tour and Travel. Penulis aktif meneliti dan mengabdikan pula yang telah terpublikasi di beberapa jurnal ilmiah. Email: muhammadyazid02@gmail.com.

# PENGANGGURAN DAN INFLASI

Rianda Hanis

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

riandahanis@gmail.com

**Abstrak:** Pengangguran dan inflasi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perekonomian, selain itu tingkat pengangguran dan inflasi juga sering dijadikan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait pengangguran dan inflasi akan berdampak negatif bukan hanya pada perekonomian, tetapi juga akan berdampak negatif pada kondisi keamanan, sosial, dan politik. Oleh karenanya pembahasan mendalam tentang pengangguran dan inflasi menjadi penting untuk dilakukan. Tulisan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pengangguran dan inflasi, seperti pengertian dan mengukur tingkat pengangguran dan inflasi, penyebab terjadinya pengangguran dan inflasi, dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh keduanya.

Kata Kunci : Pengangguran, Inflasi.

## Pendahuluan

Perekonomian tidak akan selalu berada pada kondisi yang diinginkan. Sebuah perekonomian harus menanggung konsekuensi-konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Konsekuensi dari kondisi turun naiknya pertumbuhan ekonomi adalah munculnya persoalan pengangguran dan inflasi di dalam perekonomian

Persoalan pengangguran dan inflasi merupakan persoalan yang sensitif bagi pemerintah suatu Negara, karena selain dijadikan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian, kegagalan dalam mengatasi persoalan pengangguran dan inflasi akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan juga akan berdampak negatif terhadap kondisi keamanan, sosial dan politik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sinaulan (2019) bahwa

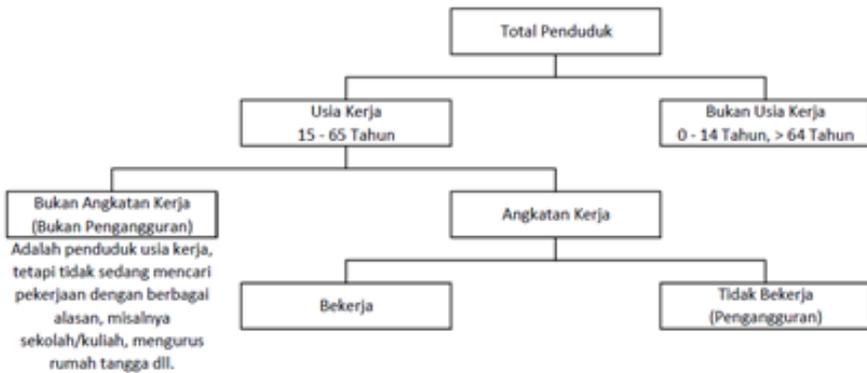
partisipasi angkatan kerja dalam mengisi proses pembangunan nasional merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Listiana dan Sariyani (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Negara-negara ASEAN pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1999, hal ini menunjukkan bahwa ternyata kedua masalah ekonomi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Tulisan ini akan mencoba untuk mengurai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa pengertian dan bagaimana mengukur tingkat pengangguran dan inflasi, apa penyebab dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh pengangguran dan inflasi.

### **Pengangguran**

Pengangguran dalam konteks ilmu ekonomi mempunyai makna seseorang yang ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Murni (2016) menjelaskan bahwa pengangguran adalah orang-orang yang berada pada kelompok usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran jika dilihat dari sudut pandang ilmu kependudukan (demografi), adalah orang-orang yang masuk ke dalam kelompok usia kerja (15 s.d 65 tahun) dan tergolong ke dalam kelompok angkatan kerja karena mereka sedang pada kondisi bekerja atau sedang mencari kerja. Lebih jauh Sukirno (Sukirno, 2000) menjelaskan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah tergolong dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Untuk lebih memahami posisi pengangguran dalam masyarakat dapat dilihat dari diagram berikut:



Gambar 1. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

### Tingkat Pengangguran

Sukirno (Sukirno, 2000) menyatakan bahwa kinerja ekonomi pemerintah bukan dilihat dari jumlah pengangguran, tetapi dilihat dari tingkat pengangguran yang merupakan persentase dari angkatan kerja. Untuk menentukan tingkat pengangguran perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan data penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dan masih menganggur.
2. Menentukan data penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja.
3. Menghitung persentase pengangguran yang berlaku terhadap jumlah angkatan kerja.

Sehingga angka tingkat pengangguran dapat didapatkan melalui rumus berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran (\%)} = \frac{\text{Unemployment (Jumlah Pengangguran)}}{\text{Labor Force (Jumlah Angkatan Kerja)}} \times 100$$

Berikut adalah data tingkat pengangguran di Indonesia per Februari 2018 sampai dengan Februari 2022.

Tabel 1. Jumlah dan Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Pengangguran	
	(%)	Jumlah
Februari 2022	5,83	8.402.150
Februari 2021	6,26	8.746.010
Februari 2020	4,94	6.925.490
Februari 2019	4,98	6.898.800
Februari 2018	5,10	6.963.460

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih pada kategori terkendali, hanya saja pada tahun 2021 terjadi lonjakan tingkat pengangguran sebesar 26,29% dari tahun sebelumnya atau sebesar 6,26% dari total angkatan kerja di tahun 2021.

Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa besar kecilnya angka pengangguran atau tinggi rendahnya tingkat pengangguran sangat tergantung dari definisi atau pengelompokan pengangguran. Setidaknya ada 2 metode pendekatan dalam pengklasifikasian pengangguran, yaitu pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*) yang mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja, dan pendekatan angkatan kerja (*labour force approach*) yang membedakan angkatan kerja menjadi tiga kelompok:

1. Menganggur (*unemployed*), adalah orang-orang yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sering juga disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).
2. Setengah menganggur (*under employed*), adalah orang-orang yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh (jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu).
3. Bekerja penuh (*employed*), yaitu orang-orang yang bekerja penuh dengan jam kerja mencapai 35 jam per minggu.

## Jenis-Jenis Pengangguran

Dalam kajian teori ekonomi makro pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*) dan pengangguran terpaksa (*involuntary unemployment*). Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang terbentuk karena pencari kerja dengan sukarela tidak atau belum bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Sitohang (2017) menerangkan bahwa yang dimaksud pengangguran sukarela adalah seseorang yang sengaja tidak bekerja karena disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusannya. Dari definisi pengangguran sukarela di atas, menunjukkan bahwa jenis pengangguran ini bersifat sementara. Sedangkan pengangguran terpaksa dijesakan oleh Murni (2016) sebagai suatu kondisi dimana pencari kerja terpaksa menganggur walaupun pada tingkat upah yang berlaku mereka masih bersedia untuk bekerja.

Selain kedua jenis pengangguran yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan keadaan yang menyebabkannya pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Sukirno (2000) menjelaskan bahwa pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya. Pengangguran jenis ini bukanlah wujud dari ketidakmampuan pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi lebih sebagai akibat dari keinginan mencari pekerjaan yang lebih baik, pada kondisi ini ada kalanya pencari kerja harus menganggur. Pengangguran jenis ini bersifat sementara.

2. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Tarsidin (2009) menjelaskan bahwa pengangguran struktural dapat terjadi saat perekonomian pada kondisi *full employment*, yang mana besarnya menunjukkan *natural rate of unemployment*. Lebih lanjut Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan pengangguran structural terjadi karena pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan pemberi kerja.

### 3. Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*)

Listiana dan Sariyani (2020) menjelaskan bahwa pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi akibat dari rendahnya permintaan dari output potensial yang terjadi pada perekonomian. Kondisi ini menjelaskan bahwa pengangguran siklis muncul akibat dampak naik turunnya siklus ekonomi yang mengakibatkan permintaan tenaga kerja lebih sedikit dari pada penawaran tenaga kerja.

### 4. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa pengangguran jenis ini berkaitan sangat erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, biasanya terjadi pada sektor pertanian.

## **Penyebab Pengangguran**

Zarkasi (2015) menjelaskan bahwa fluktuasi presentase jumlah pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pengalaman dan keahlian masyarakat akan menyebabkan akumulasi jumlah pengangguran semakin tinggi dan berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Penyebab lainnya dari pengangguran sebagaimana hasil penelitian Arifin dan Firmansyah (2017) with the figure reaching 10.74 percent. This is particularly worrying given the province of Banten Province is newly established and is known for a large industrial sector that should be able to absorb the unemployment rate and the labor force. And the study was conducted to examine the effect of higher education graduates and the chance to unemployment in the province of Banten. The analytical method used is regression analysis with panel data in the form of secondary data for a period of nine years from 2003 to 2011. Test analysis used partial statistical test (t-test adalah rendahnya tingkat pendidikan, karena variabel tingkat pendidikan dan pengangguran mempunyai hubungan negatif, artinya semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka akan membuat angka pengangguran semakin tinggi pula.

## **Dampak Pengangguran**

Alhudhori (2017), Ayu dan Faisal (2021) menyatakan bahwa pengangguran berdampak positif terhadap jumlah penduduk miskin, semakin tinggi angka pengangguran maka akan semakin tinggi pula angka kemiskinan.

Franita (2016) menjelaskan bahwa pengangguran akan berdampak pada turunnya tingkat perekonomian, ketidak stabilan politik, timbulnya masalah-masalah sosial dan keamanan. Selain itu pengangguran juga akan menimbulkan masalah mental pada masyarakat, kondisi menganggur akan menimbulkan rasa percaya diri rendah dan keputusasaan pada masyarakat, kondisi tersebut dapat menimbulkan depresi pada masyarakat.

## **Inflasi**

Atmaja (1999) menjelaskan bahwa fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara.

Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari pengertian di atas, suatu kondisi ekonomi dapat dikatakan sedang terjadi inflasi jika terpenuhi tiga kondisi sebagai berikut (1) Kenaikan Harga, (2) Bersifat Umum, (3) Berlangsung Terus-Menerus. Simanungkalit (2020) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kenaikan harga bukanlah kenaikan harga satu atau dua barang saja, kecuali kenaikan harga yang terjadi meluas sehingga akan menjadi penyebab kenaikan harga barang-barang lainnya.

## **Penyebab Inflasi**

Atmaja (1999) menjelaskan bahwa kaum moneteris menekankan sebab terjadinya inflasi adalah pada peranan jumlah uang beredar dan pada harapan (ekspektasi) masyarakat terhadap kenaikan harga di masa yang akan datang. Dari teori tersebut tampak bahwa terdapat hubungan yang positif antara penambahan volume jumlah uang

beredar dengan laju inflasi. Kondisi demikian akan menimbulkan *inflationary gap* yang merupakan kondisi dimana jumlah produk domestik bruto aktual melebihi potensi PDB pada kesempatan kerja penuh.

Sedangkan teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena permintaan agregat masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi penawaran barang dan jasa agregat yang tersedia.

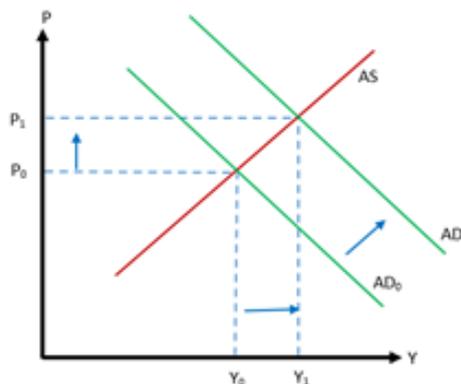
Pendapat lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Zarkasi (2015) bahwa menurut pendapat para ahli inflasi dapat pula disebabkan karena tingginya biaya produksi yang ditandai dengan kenaikan harga faktor produksi dan menurunnya tingkat output produksi.

### Jenis Inflasi

Inflasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis tergantung kepada sumber atau penyebab terjadinya inflasi, tingkatan laju dari inflasi tersebut dan dari perspektif Ekonomi Islam.

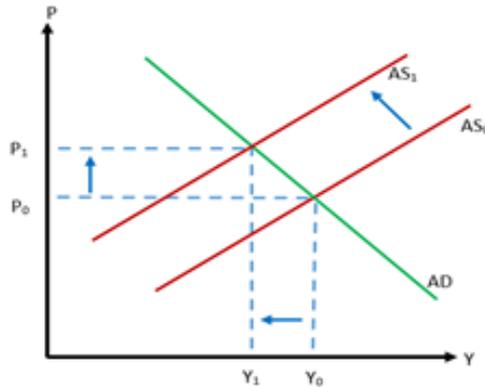
#### a. Jenis Inflasi Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi

1. *Demand Pull Inflation* atau yang biasa disebut dengan inflasi tekanan permintaan. Adalah inflasi yang terjadi akibat tekanan permintaan agregat yang digambarkan bergesernya kurva  $AD_0$  menuju  $AD_1$  (Gambar 2). Bertambahnya AD akan menyebabkan meningkatnya AS pada kurva yang sama yang diiringi dengan peningkatan harga (lihat pergerakan  $P_0$  menuju  $P_1$  di gambar 2).



Gambar 2. *Demand Pull Inflation*

2. *Cost Push Inflation* atau inflasi dorongan biaya, adalah inflasi yang disebabkan kenaikan harga faktor produksi yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya penawaran agregat. Pada gambar 3 terlihat bahwa pergeseran kurva  $AS_0$  ke  $AS_1$  akan menyebabkan kenaikan harga dari  $P_0$  ke  $P_1$  dan menyebabkan kontraksi pada ekonomi dengan turunnya jumlah output nasional dari  $Y_0$  ke  $Y_1$ .



**Gambar 3. *Cost Push Inflation***

b. Jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat Laju Inflasi

Atmaja (1999) menjelaskan bahwa inflasi jika dilihat dari derajat atau tingkat laju inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu (1) inflasi ringan, jika laju inflasi masih berada di bawah 10%, (2) inflasi sedang, adalah kelompok inflasi yang tingkat laju inflasinya berada pada 10% sampai dengan 30%, (3) inflasi tinggi, merupakan pengelompokan inflasi pada tingkat laju inflasi di atas 30% sampai dengan 100%, (4) hyper inflasi, adalah laju inflasi yang terjadi di atas 100%.

c. Jenis Inflasi ditinjau dari kacamata Ekonomi Islam

Salah seorang pemikir ekonomi islam Al-Maqrizi dalam Salam (2020) menjelaskan bahwa penyebab inflasi jika dilihat dari kaca mata Ekonomi Islam adalah inflasi yang terjadi akibat dari sebab alamiah (*natural inflation*) dan inflasi yang terjadi dikarenakan akibat dari kesalahan manusia (*human error inflation*). *Natural inflation* terjadi dikarenakan sebab-sebab yang diluar kendali

manusia seperti bencana alam yang menyebabkan hasil bahan makanan yang berasal dari hasil bumi akan merosot sehingga terjadi kelangkaan yang pada akhirnya akan menaikkan harga dikarenakan terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran.

### Mengukur Laju Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang dapat digunakan dalam menghitung laju inflasi:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK), adalah angka yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa utama yang harus dibeli oleh konsumen dalam satu periode tertentu. Inflasi dengan melihat indikator IHK dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$$

2. Indeks Harga Produsen (IHP), adalah salah satu cara melihat laju inflasi dari sisi produsen yaitu dengan menghitung tingkat harga yang diterima oleh produsen pada berbagai tingkat produksi. Menghitung inflasi dengan menggunakan data IHP dapat dilakukan dengan rumus

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHP} - \text{IHP}_{-1})}{\text{IHP}_{-1}} \times 100\%$$

3. Indeks harga Implisit (IHI), biasa disebut dengan GDP Deflator adalah dengan membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi riil. Laju inflasi dengan menghitung IHI dapat dilakukan dengan rumus

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$$

### Dampak Inflasi

1. Pada Pertumbuhan Ekonomi

Simanungkalit (2020) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi,

maka akan semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Satria (2012) menjelaskan dalam studinya bahwa terdapat hubungan non linier jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pada Distribusi Pendapatan

Inflasi dapat berdampak buruk pada distribusi pendapatan apabila laju pertumbuhan inflasi ternyata tidak dapat diimbangi oleh laju pertumbuhan pendapatan. Pada kondisi ini, sebagian masyarakat mungkin saja dapat meningkatkan pendapatan riil mereka lebih dari 0% per tahun (perumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi), tetapi sebagian masyarakat lain malah mengalami hal sebaliknya, yaitu pendapatan riil akan semakin menurun dan kondisi ini akan memperburuk distribusi pendapatan.

## 3. Pada Stabilitas Ekonomi

Karim (2015) menjelaskan bahwa menurut para ekonom Islam inflasi dapat berdampak buruk pada perekonomian karena (1) dapat menimbulkan gangguan pada fungsi uang, (2) melemahkan semangat menabung pada masyarakat, (3) meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama pada barang-barang non primer, (4) mengarahkan masyarakat pada penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing.

Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa inflasi dapat merusak ekspektasi para pelaku ekonomi, bagi konsumen akan cenderung meningkatkan pembelian barang dan jasa sebagai upaya penghematan dikarenakan perkiraan harga yang akan terus naik di masa yang akan datang, bagi produsen malah akan cenderung menunda penjualan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar akibat dari perkiraan harga yang akan terus naik di masa yang akan datang. Akibatnya kesenjangan antara AS dan AD akan semakin besar yang pada akhirnya akan mempercepat laju inflasi.

## 4. Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Rahmahi (2011) menjelaskan bahwa inflasi akan meningkatkan pengeluaran masyarakat kelompok miskin, dikarenakan tingginya harga perolehan barang kebutuhan sehari-hari, akan tetapi kondisi inflasi ini belum tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat

kelompok miskin. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa inflasi akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat kelompok miskin dan menengah.

## Simpulan

Pengangguran dan inflasi merupakan masalah perekonomian yang pasti akan dihadapi oleh setiap negara, keduanya merupakan indikator yang diamati untuk menilai kinerja perekonomian pemerintah. Bagaikan api, pada kondisi normal atau kondisi yang terkendali, inflasi dan pengangguran bukan menjadi ancaman dalam perekonomian, tetapi sebaliknya jika keduanya sudah mulai sulit untuk dikendalikan, maka akan menjadi masalah serius bagi perekonomian negara. Analisis- analisis yang dalam tentang pengangguran dan inflasi menjadi sangat dibutuhkan sebagai landasan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan laju pengangguran dan inflasi.

## Daftar Pustaka

- Alhudhori, M. (2017) 'Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi', *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 1(1), p. 113. doi: 10.33087/ekonomis.v1i1.12.
- Arifin, S. and Firmansyah (2017) 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7(2). doi: 10.35448/jequ.v7i2.4978.
- Atmaja, A. S. (1999) 'Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), pp. 54-67. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/73378-ID-inflasi-di-indonesia-sumber-sumber-penye.pdf>.
- Ayu, N. E. N. and Faisal, A. A. (2021) 'Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar', *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1), pp. 1-12. Available at: <https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/best/article/view/19637>.

- Badan Pusat Statistik (2022) *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>.
- Franita, R. (2016) 'Analisa Pengangguran Di Indonesia', *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1(1), pp. 88-93. Available at: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/97/97>.
- Karim, A. A. (2015) *Ekonomi Makro Islam*. Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Listiana, Y. and Sariyani (2020) 'Determinan Inflasi Dan Pengangguran Di Negara Asean', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2), pp. 328-334. doi: 10.33005/jdep.v3i2.113.
- Murni, A. (2016) *Ekonomika Makro*. Revisi. Edited by N. F. Atif. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardja, P. and Manurung, M. (2008) *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Ketiga. Jakarta: LPFEUI.
- Rahmahi, Y. P. (2011) 'Dampak Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia 1976-2008', *Journal Riset Daerah*, X(3), pp. 1634-1651.
- Salam, W. R. (2020) 'Inflasi Ditengah Pandemi Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Syntax Transformation*, 1(5), pp. 187-192. Available at: <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/72>.
- Satria, D. (2012) 'Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia', *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), p. 123. doi: 10.24036/ecosains.348757.00.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020) 'Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's)*, 13(3), pp. 327-340. Available at: <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/3311>.
- Sinaulan, R. D. (2019) 'Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 5(1), pp. 55-62. doi: 10.32884/ideas.v5i1.173.

- Sitohang, Y. O. (2017) 'Identifikasi Pengangguran Sukarela (Voluntary Unemployment) Perempuan Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2015', *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 17(1), pp. 17–24. doi: 10.29313/jstat.v17i1.2341.
- Sukirno, S. (2000) *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. 1st edn. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tarsidin (2009) 'Pengangguran Struktural; Faktor Yang Mempengaruhi dan Dinamikanya', *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 11(3), pp. 201–231. doi: 10.21098/bemp.v11i3.
- Zarkasi (2015) *Pengangguran, Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.

### Biografi Penulis



**Rianda Hanis, SEI., ME.** Lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1979. Merupakan anak pertama dari pasangan Ir. H. Idwar Hanis dan Delli yana. Mengenyam pendidikan dasar di SDN 06 Pontianak dan SMPN 13 Pontianak. Menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 1999 Akhir (Alumni Spinkers) dan melanjutkan pendidikan Strata 1 pada bidang ilmu Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak kemudian melanjutkan pendidikan Magister pada bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Tanjungpura Pontianak. Saat ini aktif sebagai Dosen di Prodi Perbankan Syariah IAIN Pontianak sejak tahun 2016.

# PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Ana Fitriyatul Bilgies, S.E., M.M.

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

**Abstrak:** Perdagangan luar negeri ini merupakan perdagangan yang meliputi penjualan barang maupun jasa antar negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan luar negeri berperan sebagai kebutuhan hidup masyarakat di berbagai negara di berbagai wilayah dunia. Dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun demikian tidak semua negara atau wilayah memiliki sumber daya ataupun hal yang dapat memenuhi kebutuhan individunya pada antar negara. Dan dengan pengetahuannya mengenai sumber daya yang ada pada negara lain yang tidak dimiliki oleh negaranya maka akan terjadi sebuah penawaran akan pembelian sumber daya barang maupun jasa antar negara tersebut. Dimana dalam hal ini akan menyebabkan terjadinya perdagangan internasional atau bisa juga sebagai perdagangan luar negeri. Dalam hal ini akan membuka pendapatan baru di negara yang akan melajukan inflasi pada suatu negara dengan adanya pasar antar satu negara dengan negara lainnya. Didalam perdagangan luar negeri, pemerintah ikut berperan aktif dalam perkembangan bisnis antar negara yang dalam hal ini mempengaruhi kebutuhan suatu negara secara menyeluruh. Didalam perdagangan luar negeri ini diharapkan memberikan dampak positif bagi negara lain yang bertransaksi sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 tahun 2014 yang dimana dalam perdagangan luar negeri ini bertujuan sebagai kelancaran perdagangan antar negara-negara yang ada di dunia.

Kata Kunci: Perdagangan, Sumber daya

## Pendahuluan

Perdagangan luar negeri ini merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dimana dalam transaksinya terjadi diluar negeri. Pada proses ini bergantung kepada keadaan pasar yang hasil dari produksi maupun factor pasar produksi dan pada tiap-tiap pasar

yang terkait antara satu negara dengan negara yang lain dan pastinya berpengaruh pada hasil usaha ataupun hasil pada kesempatan kerja.

Perdagangan luar negeri ini dapat diartikan bahwa suatu kegiatan/aktivitas yang terjadi antara suatu negara. Yang dimana prosesnya dapat memberikan suatu keuntungan bagi tiap negara dan juga dapat memberikan suatu keuntungan dalam suatu negara yang dihasilkan dari hasil pendapatan produksinya. Dan pada kegiatan ini secara langsung juga berpengaruh bagi alokasi pada hasil sumber daya ataupun dengan tidak langsung juga akan banyaknya para investor yang nantinya memasuki kawasan negara yang memiliki sumber daya tersebut. Dan pada banyaknya suatu bentuk hambatan atau juga gangguan yang terjadi dalam perdagangan luar negeri harus dijaui dan sebisa mungkin harus di hindari, jika tidak maka dapat menimbulkan gangguan yang pada jalannya aktivits perdagangan tersebut.

Perdagangan luar negeri ini juga bepengaruh pada seluruh negara. Yang mendagangkan produk-produk atau barang yang tidak dihasilkan oleh negaranya tersebut guna menambah pengetahuan dan juga menambah keuntungan bagi negara. perdagangan ini dilakukan dengan cara ekspor dan juga maupun impor.

### ***Pengertian dari Perdagangan Luar Negeri***

Perdagangan Luar Negeri merupakan suatu aktivitas perdagangan yang kegiatannya ada pada luar negara. Dari aktivitas perdagangan ini bergantung kepada situasi pasar hasil produksi maupun pada pasar faktor produksi yang dimana pada tiap pasar yang saling berhubungan dan berkesimanbungan antara satu negara dengan negara yang lainnya dan tentunya dapat beresiko pada hasil produksi maupun pada kesempatan kerja. Dan juga pada permintaan suatu barang dapat ditentukan dari banyaknya pendapatan pada hasil suatu barang yang di ekspor. (Dr. H. Darmo dan H. Suwiryono 2018:41)

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang perdagangan luar negeri adalah kegiatan perdagangan yang meliputi kegiatan Ekspor dan Impor pada suatu barang dan jasa yang dimana perdagangannya keluar batas dari wilayah negara. Dan dapat di ketahui bahwa tidak ada

satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Maka dari itu pemerintah melakukan kegiatan ekspor-impor barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak barang yang kita gunakan sehari-hari yang berasal dari luar negeri, diantaranya yaitu computer, Motor, Televisi, Mobil, dll.

Perdagangan Luar Negeri ini juga merupakan perdagangan yang diantaranya yaitu melakukan kegiatan seperti tukar menukar barang antar negara dengan perantara uang dengan kota lain. Perdagangan Luar Negeri ini juga disebut dengan perdagangan yang kegitannya adalah ekspor impor antar negara. Adapun pengertian dari ekspor yaitu menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor yaitu kegiatan membeli suatu barang atau bisa juga mendatangkan barang dari luar negeri.

Pada perdagangan luar negeri ini besar kemungkinan terjadi karena kebanyakan adanya perbedaan harga produk antara produk dalam negeri dengan luar negeri. Yang dimana harga pada luar negeri cenderung lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri itu sendiri.

## **Pembahasan**

### ***Transaksi Perdagangan Luar Negeri***

Menurut Hendra Halwani dalam buku Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro Makro bahwa kegiatan tukar menukar barang pada aktivitas perdagangan luar negeri ini bisa disebut sebagai susunan dalam suatu kegiatan ekspor-impor. Dalam perdagangan luar negeri ini bisa dikatakan sebagai perdagangan yang memiliki peraturan transaksi yang tergolong sederhana, yaitu dengan menjual serta membeli barang antar perusahaan yang dimana perusahaan tersebut berada di negara yang berbeda-beda.

Pembayaran luar negeri ini merupakan pembayaran yang dimana pada pembayarannya dilakukan oleh suatu negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri dan tentunya telah disepakati oleh negara yang bersangkutan.

Pada Undang-undang negara Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 tentang Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982

menjelaskan sebagaimana tata cara transaksi kegiatan ekspor dan impor dan bagaimana berjalannya devisa, serta tatacara pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor yang dalam hal ini pembayarannya bisa di lakukan dengan:

1. Bayar Dimuka (*Advance Payment*)
2. Hitungan dari Kemudian Hari (*Open Account*)
3. Pemberian surat wesel (*Incaso Wesel*)
4. Perjanjian Konsinyasi (*Consignment*)
5. Letter Of Credit (*L/C*)
6. Sesuai Dengan Kesepakatan Antara Penjual dan Pembeli

### ***Faktor Pendorong Timbulnya Perdagangan Luar Negeri***

Ada beberapa faktor pendorong akan timbulnya kegiatan perdagangan luar negeri diantaranya adalah :

#### **1. Perbedaan Sumber Daya Alam**

Karena tak banyak negara mempunyai SDA yang sama. SDA ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Karena ini merupakan suatu bahan utama pada produk tertentu. Di negara yang memerlukan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki SDA yang sesuai dengan kebutuhannya. Peristiwa ini yang menjadikan pemicu timbulnya perdagangan internasional atau bisa disebut dengan perdagangan luar negeri. Seperti contoh, negara Indonesia ini dikenal karena banyak adanya kekayaan alam. Namun, dalam masalah produktivitas, di negara Indonesia belum cukup sehingga memicu Indonesia untuk mau menawarkan hasil SDA ke negara luar (ekspor) guna mencukupi kebutuhan pada negara tersebut.

#### **2. Penghematan Biaya Produksi, SDM dan Ilmu Pengetahuan**

Di setiap negara pasti mempunyai suatu kemampuan tenaga kerja dan teknologi yang berbeda di setiap manusia. Di negara yang dibekali SDM yang mencukupi dan tentunya memadai sehingga mampu untuk mengoleh suatu barang hingga memiliki kualitas yang sangat bagus. Sedangkan bagi negara yang dengan SDM dan teknologi yang kurang canggih tentu akan

mengimpor teknologi tersebut dari pembuatnya yang tentu bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah daripada membuat sendiri. Contohnya seperti negara yang memiliki teknologi yang kurang canggih maka negara tersebut akan membeli teknologi yang lebih canggih untuk memaksimalkan produksinya.

### 3. Pemenuhan Kebutuhan Nasional

Tak banyak di negara yang bisa mencukupi kebutuhan pasarnya sendiri dan penduduknya. Pasti banyak masyarakat yang akan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya, di negara sendiri juga disarankan untuk melakukan pembelian atau perdagangan ke luar negeri yang berupa impor ataupun ekspor barang dan jasa dari negara lain. Contohnya yaitu apabila kita sedang membutuhkan alat untuk memproduksi barang tetapi di negeri sendiri tidak ada barang tersebut maka mau tidak mau kita harus impor barang dari luar negeri. Begitu pun sebaliknya dengan negara lain.

### 4. Meningkatkan Pemasukan Negara

Pada kegiatan ekspor impor ini adalah suatu kegiatan negara yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatannya. Negara yang akan lebih untung mendapatkan keuntungan dari hasil pajak barang pada hasil ekspor dan impor tersebut. Negara juga bisa melakukan ekspor melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan cara menjual bahan-bahan hasil bumi atau juga menjual teknologi ke negara lain.

## ***Dampak dari Perdagangan Luar Negeri***

### a. Dampak Positif dari Perdagangan Luar Negeri

#### 1. Menjalin kekerabatan yang baik terhadap negara lain

Apabila pada kegiatan ekspor-impor luar negeri berjalan sesuai perjanjian antar negara, maka dapat menimbulkan suatu kepercayaan dari negara lain.

#### 2. Memperbanyak lapangan pekerjaan

Didalam aktivitas perdagangan luar negeri sangat membutuhkan tenaga kerja manusia. Hal ini sangat berpengaruh dengan

adanya suatu lapangan pekerjaan yang sangat luas juga pasti menciptakan kesejahteraan sosial.

3. Memudahkan rakyat negara untuk senantiasa mencukupi kebutuhannya

Masyarakat jika menginginkan sesuatu produk, tetapi produk tersebut sangat sulit didapatkan di negara tersebut. Sehingga membeli atau mengimpor barang dari luar negeri bisa menjadi solusi akan permasalahan tersebut.

b. Dampak Negatif dari Perdagangan Luar Negeri

1. Menimbulkan sifat konsumtif

Perilaku konsumtif kebanyakan muncul pada kita melihat suatu barang yang ada di luar negeri yang terlihat bagus, sebaiknya perilaku yang seperti itu lebih baik di jauhi karena dapat merugikan negara kita dan tentunya bagi diri sendiri juga. Contohnya yaitu kita yang lebih condong terhadap budaya barat. Dan Ketika melihat barang yang dukenakan bagus, maka kita akan ikut membeli.

2. Ketergantungan pada negara lain

Penyebabnya biasanya ketika barang luar negeri lebih bagus daripada barang yang ada dalam negeri. Sehingga lebih tertarik untuk membeli barang impor. Contohnya juga Ketika ada barang luar negeri yang bagus dan murah, pasti kita akan tergiur untuk membelinya.

3. Melemahkan uang yang ada di dalam negeri

Ketika kegiatan impor lebih tinggi dari pada kegiatan ekspor, akan lebih mempengaruhi nilai pada mata uang rupiah. Oleh karena itu menggunakan produk yang ada dalam negeri itu amat penting untuk negara kita. Contohnya kita yang membeli produk dari luar negeri dibanding produk lokal dala, negeri.

***Manfaat dan Hambatan dalam Perdagangan Luar Negeri***

- a. Manfaat Perdagangan Luar Negeri

Sebenarnya pada manfaat dalam aktivitas perdagangan luar negeri mendekati sama dengan dampak positif yang adapada kegiatan

perdagangan luar negeri. Diantaranya adalah:

1. Kebutuhan setiap negara tercukupi
  2. Menambah devisa negara
  3. Mendorong kemajuan IPTEK
  4. Mempererat hubungan persahabatan antar negara
  5. Memperluas jaringan pasar
- b. Hambatan dalam Perdagangan Luar Negeri

Berikut ini ada beberapa hambatan dari aktivitas perdagangan luar negeri. Diantaranya adalah:

1. Perbedaan mata uang

Setiap negara memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda, Jika kita sebagai pengekspor yang mempunyai mata uang yang jauh berbeda dengan mata uang negara lain, maka kita sebagai pengimpor akan merasa sangat terbebani jika harus membayar mata uang sesuai dengan mata uang si pengekspor. Dan tidak akan mendapatkan keuntungan, melainkan si pengimpor akan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai mata uang yang ada di negaranya.

2. Kualitas Sumber Daya Alam yang rendah

Pada suatu negara yang jika mempunyai kualitas SDA yang relatif rendah, maka produk yang dihasilkan otomatis juga akan mengalami rendah juga. Hal ini yang menyebabkan negara kita mengalami kesulitan dalam bersaing antar pasar bebas. Hal ini yang menyebabkan produk pada negara kita akan kalah dengan kualitas prosuk luar negeri atau negara lain.

3. Munculnya Para Mafia Ekonomi

Keberadaan pasar-pasar gelap saat ini sangat mengganggu proses perdagangan luar negeri. Karena para perusahaan yang kaya akan lebih menggunakan upaya bagaimana cara agar bisa mendapatkan produk yang di incar. Dan pada umumnya mereka para pengusaha akan menguasai proses jalannya suatu perekonomian luar negeri daripada dengan negaranya sendiri.

## ***Proteksi dan Pembatasan Perdagangan***

### a. Definisi dari Proteksi Perdagangan

Proteksi disini adalah sebuah perlindungan yang digunakan dalam aktivitas perdagangan atau pada suatu industri. Tujuannya dari proteksi ini yaitu untuk menjaga atau melindungi kegiatan industry yang ada di dalam negeri dari pesaing barang-barang impor. Yang dalam hal ini biasanya yaitu dijalankan dengan tarif atau kuota dan sebagainya.

Sedangkan tarif sendiri merupakan beban pajak terhadap barang-barang yang melewati batas pada suatu nega

#### 1. Tarif dikelompokkan menjadi:

- a) Biaya Ekspor. Biaya ekspor merupakan biaya perpajakan yang sasarannya kepada suatu barang yang dibawa oleh manusia masuk ke negara lain.
- b) Biaya Transisto. Biaya transisto merupakan biaya perpajakan yang sasarannya ditujukan kepada barang yang melewati suatu wilayah dengan ketentuan bahwa nantinya barang tersebut sebagai tujuan akhir di negara lain.
- c) Biaya impor. Biaya impor merupakan biaya perpajakan yang sasarannya kepada suatu barang yang termasuk kedalam kategori pada wilayah suatu negara dan harus ada ketentuan bahwa nantinya barang-barang itu akan digunakan menjadi hasil terakhir pada negara lain.

#### 2. Bentuk-bentuk Proteksi:

##### a) Penggunaan tarif

Tarif merupakan beban pajak oleh suatu barang yang dimana barang itu melintasi wilayah teretntu. Dan selain itu juga barang-barang yang masuk ke wilayah negara lain dan akan dikenakan biaya masuk

##### b) Quota

Quota merupakan pembatasan atas jumlah barang yang masuk ataupun barang yang keluar.

##### c) Larangan Impor

Apabila di suatu negara melarang akan adanya impor suatu barang, maka perindustrian di dalam negeri yang

system produksinya akan memperoleh proteksi. Dan proteksi ini bersifat berdiri sendiri dan berlaku untuk sistem perindustrian dinegeri sendiri.

d) Bantuan ekonomi

Karena bantuan ekonomi yang ada di dalam negeri, produsen dapat menjual barang dengan harga yang relative murah dan dapat bersaing dengan barang-barang impor.

b. Faktor-Faktor Yang Mendorong Proteksi

Ada beberapa factor yang menjadi tujuan proteksi, antara lain:

1. Memecahkan permasalahan dalam penurunan harga barang secara terus menerus dan tidak adanya suatu lowongan pekerjaan
2. Mengedepankan pertumbuhan perindustrian baru
3. Mendiversifikasikan perekonomian
4. Mencegah merosotnya suatu perindustrian
5. Membenahi transaksi pembayaran
6. Mencegah merosotnya transaksi pembayaran
7. Mencegah sistem penjualan barang luar negeri dengan harga yang relatif rendah
8. Menambahkan pemasukan negara

c. Alat Pembatasan Perdagangan

Pembatasan perdagangan merupakan suatu pedoman yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi banyaknya barang yang didatangkan dari luar negeri. Kendala dalam melakukan perdagangan dibagi menjadi empat macam harga dan pajak, serta kuota.

### ***Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi***

a. Pengertian Globalisasi

Globalisasi merupakan kenaikan dengan memiliki hubungan perekonomian antar negara. Menurut Selo Soemardjan, globalisasi ialah komunikasi yang terbentuk antara organisasi maupun masyarakat yang ada di dunia, memiliki perbedaan akan tetapi memiliki tujuan yang sama.

b. Faktor-Faktor yang Mewujudkan Globalisasi

Ada beberapa factor yang dapat mewujudkan globalisasi, antara lain:

1. Kemajuan politik pada dunia
2. Banyaknya prakektek perdagangan bebas
3. Kemajuan investasi keuangan internasional
4. Kemajuan teknologi dan system informasi
5. Perkembangan perusahaan multinasional

c. Karakteristik Globalisasi

1. Perubahan dari masa ke masa

Dengan adanya temuan alat-alat baru seperti alat elektronik (HP, Laptop, dll) dan penemuan lainnya memberi bukti bahwa komunikasi global dapat dilakukan dengan praktis dan cepat.

2. Pasar setra produksi yang ada di seluruh negara memiliki ketergantungan dari satu negara dengan negara lain yang disebabkan karena adanya perdagangan internasional.

3. Meningkatnya komunikasi menggunakan perkembangan media massa, dalam arti dengan adanya media massa, dapat memelihara dan memahami berbagai macam aneka ragam budaya di dunia.

4. Permasalahan seperti kejahatan, krisis, maupun kerusakan lingkungan meningkat.

d. Kelebihan dan Kekurangan Globalisasi

1. Kelebihan globalisasi

- a) Dapat memajukan kemakmuran masyarakat
- b) Memberikan modal yang lebih banyak serta teknologi yang lebih canggih
- c) Mengembangkan pasar untuk hasil produksi
- d) Mendapat suntikan dana guna membangun perekonomian

2. Kekurangan gobalisasi

- a) Pertumbuhan industry manufaktur menjadi terhambat
- b) Neraca pembayaran menjadi buruk
- c) Tidak stabilnya sector keuangan

- d) Pertumbuhan perekonomian jangka Panjang tidak stabil.
- e. Alasan adanya Impor Barang
  1. Mendapatkan barang buatan luar negeri yang pada proses produksinya tidak dalam negeri  
Tidak semua negara memiliki atau memproduksi barang-barang yang dibutuhkan, maka dari itu, negara-negara yang tidak dapat memproduksi barang-barang tersebut harus mendatangkan barang dari negara lain untuk melanjutkan industrinya.
  2. Mendapatkan laba atau keuntungan  
Diketahui bahwa dari kegiatan perdagangan liar negeri ini bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh spesialisasi itu sendiri. Yang dimana pada suatu barang yang tentu sama jenisnya tetapi produksinya berbeda atau dari negara lain, maka ada ada kalanya pada negara tersebut mengimpor barang dari negar tersebut dan bisa di distribusikan kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi,
  3. Memperluas pasar industri di dalam negeri  
Dengan menggunakan mesin produksi maka keuntungan dari barang-barang yang dihasilkan akan tambah. Dan apabila kapasitas dari mesin-mesin masih rendah dan tidak mencapai tingkat optimal, maka ekspor ke luar negeri akan meningkatkan keefisienan pada mesin-mesin yang dipakai dan dapat mengurangi biaya prosuksi itu sendiri.
  4. Memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan produktivitas  
Ini dimana pada suatu negara yang ingin mempelajari tentang teknologi atau produksi pada negara lain yang dimana pada proses produksinya yang moder, maka dalam perdagangan internasional juga tidak menutup kemungkinan untuk mengimpor mesin atau peralatan yang canggih guna melaksanakan produksinya dengan cara yang lebih baik.
- f. Keuntungan dari Spesialisasi  
Ada beberapa keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara yaitu pada factor produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif

dan masyarakat dapat menikmati barang-barang yang ia beli pada negara lain.

g. Keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding

Keuntungan mutlak yaitu keuntungan yang didapatkan oleh negara yang dikhususkan pada aktivitas produksi barang-barangnya mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Sedangkan keuntungan berbanding yaitu keuntungan yang didapatkan oleh dan mengutamakan produksi barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan negara lain sehingga menimbulkan perbandingan pada harga maupun barang tersebut.

## **Simpulan**

### ***Transaksi Perdagangan Luar Negeri***

Dalam perdagangan luar negeri ini bisa dikatakan sebagai perdagangan yang memiliki peraturan transaksi yang tergolong sederhana, yaitu dengan menjual serta membeli barang antar perusahaan yang dimana perusahaan tersebut berada di negara yang berbeda-beda. Pembayaran luar negeri ini merupakan pembayaran yang dimana pada pembayarannya dilakukan oleh suatu negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri dan tentunya telah disepakati oleh negara yang bersangkutan. Pada Undang-undang negara Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 tentang Peraturan Pemerintah No. Tahun 1982 menjelaskan.

### ***Sumber Daya Alam***

Karena tak banyak negara mempunyai SDA yang sama. Di negara yang memerlukan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki SDA yang sesuai dengan kebutuhannya. Peristiwa ini yang menjadikan pemicu timbulnya perdagangan internasional atau bisa disebut dengan perdagangan luar negeri.

### ***Kebutuhan Nasional***

Tak banyak di negara yang bisa mencukupi kebutuhan pasarnya sendiri dan penduduknya. Pasti banyak masyarakat yang

akan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya, di negara sendiri juga disarankan untuk melakukan pembelian atau perdagangan ke luar negeri yang berupa impor ataupun ekspor barang dan jasa dari negara lain.

### ***Pemasukan Negara***

Pada kegiatan ekspor impor ini adalah suatu kegiatan negara yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatannya. Negara yang akan lebih untung mendapatkan keuntungan dari hasil pajak barang pada hasil ekspor dan impor tersebut.

### ***Munculnya Para Mafia Ekonomi***

Karena para perusahaan yang kaya akan lebih menggunakan upaya bagaimana cara agar bisa mendapatkan produk yang di incar.

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang kegiatannya berlangsung di luar negeri. Dalam konteks ini, beberapa keuntungan perdagangan luar negeri ditunjukkan secara umum, dan secara konkret dan rinci: spesialisasi, yaitu ketika kegiatan ekonomi suatu negara diarahkan pada produksi barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. datang dengan

Perlindungan pada hakekatnya mencegah masuknya berbagai jenis impor dengan menggunakan berbagai alat untuk menegakkan tindakan perlindungan (protection) seperti pajak impor (tarif), kuota dan hambatan non-tarif terhadap perdagangan. Globalisasi adalah tentang memahami saling ketergantungan kondisi dan kegiatan ekonomi di berbagai negara di dunia.

### **Daftar Pustaka**

(Dr. H. Darmo dan H. Suwiryo., S.E., n.d.)Dr. H. Darmo dan H. Suwiryo., S.E., M. M. (n.d.). *bisnis internasional* (pertama). mitra wacana media.

Yolanda. (2016). *Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Oleh : Yolanda Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur dan Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur*. 18(4), 1–21.

imb/asr. (n.d.). *7 faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional*. CCN Indonesia. <https://www.ccnindonesia.com/ekonomi/20210916090453-97-695078/7-faktor-pendorong-terjadinya-perdagangan-internasional>

leo bisma. (n.d.). *pengertian globalisasi, karakteristik, dan prosesnya : sosiologi kelas 12*. Ruang Guru. <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-globalisasi-sosiologi-kelas-12>

(Raspita, 2021)Raspita, D. (2021). Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dan Endosemen Dalam Produktivitas Dan Perekonomian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3455>

### Biografi Penulis



#### **Ana Fitriyatul Bilgies, S.E., M.M.**

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Penulis lahir di Lamongan tanggal 23 Mei 1988. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan manajemen pada tahun 2011 dan S2 pada tahun 2014 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim.. Dan saat ini sedang lanjut studi S3 Doktorat Manajemen di Universitas di Surabaya. Kegiatan penulis selain menulis buku buku ajar, penulis juga mengajar ekonomi dan aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Bagi penulis, kegiatan menulis adalah hobi untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran tempat meningkatkan kreatifitas dan menjadikan hidup lebih produktif.